

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

**(Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Distrik
Semangga, Kabupaten Merauke)**

TESIS

UntuK Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat S-2

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Konsentrasi : Manajemen Publik



Diajukan oleh :

DIDI PRAYITNO

D4E006075

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1	
A. Latar Belakang	
1	
B.1 Identifikasi Masalah.....	17
B.2 Rumusan Masalah	
19	
B. Tujuan Penelitian	20
D. Kegunaan Penelitian	
21	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Hakekat Program Wajar sembilan Tahun	
23	

2. Implementasi Kebijakan Publik	
30	
3. Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi Kebijakan Program Wajar 9 Tahun	49
a. Pengertian Partisipasi.....	49
b. perilaku Partisipasi Masyarakat	57
c. Faktor-Faktor yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam Program Wajar 9 Tahun.....	64
1). Pandangan Orang Tua tentang Nilai Anak ...	64
2). Persepsi Orang Tua.....	74
3). Kondisi Lingkungan/Sosial Ekonomi	80
B. Hubungan Konsep Antar Fenomena	86

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian	91
B. Ruang Lingkup Penelitian	91
C. Lokasi Penelitian	93
D. Fenomena Penelitian	93
E. Jenis dan Sumber Data	91
1. Jenis Data	96
2. Sumber Data	96
F. Instrumen Penelitian	97
H. Teknik Pengumpulan Data	98
I. Teknik Analisis Data	99

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	102
--------------------------------------	-----

B. Karakteristik Penduduk dan Sosial	
108	

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	
158	
B. Saran	
160	

Daftar Pustaka

Lampiran :

Panduan Wawancara

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecenderungan kehidupan dalam era globalisasi telah membawa berbagai perubahan yang berlangsung dengan cepat terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan segala dampaknya. Oleh karena itu, lingkungan dalam situasi global mulai terasa, antara lain lingkungan yang merangsang pemikiran majemuk, lingkungan yang memerlukan sumber daya manusia yang menguasai iptek, lingkungan yang menghormati seseorang yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan produktif, dan lingkungan yang lebih mengutamakan masyarakat “ meritokrasi “, yaitu masyarakat yang lebih menghargai prestasi daripada status dan asal-usul (Surya, 2000:4)

Melihat kenyataan ini mau tidak mau bangsa Indonesia harus terjun dalam kancah tersebut, lengkap dengan segala konsekwensinya. Untuk menyiasati ini bangsa Indonesia telah mengambil sikap dalam menghadapi percaturan ini. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Dalam pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis. Langkah yang dilakukan antara lain memfokuskan pembangunan pada bidang pendidikan. Mengingat, maju mundurnya atau berkualitas tidaknya sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pelaksanaan pendidikan sebagai agen dan pencetak sumber daya manusia.

Alasan lain pemerintah dengan mengedepankan pembangunan pendidikan karena melihat kenyataan bahwa berdasarkan data UNDP tentang *Human Development Index* (HDI) menunjukkan dari 174 negara, Indonesia berada pada posisi kurang menggembirakan yakni peringkat 110, sementara negara Asean lainnya berada di atasnya, Jepang berada di peringkat 11, Singapura berada peringkat 25, Korea berada pada peringkat 28 Brunei Darussalam peringkat 33, Malaysia peringkat 61, Thailand peringkat 73, Filipina urutan 84, Cina pada peringkat 85, Vietnam di peringkat 108, Indonesia peringkat 110, Myanmar peringkat

129, Kambodja pada peringkat 130. (Source: UNDP - Human Development Report 2005)

Pengembangan dalam bidang pendidikan di Indonesia sekarang ini menggunakan empat strategi dasar, yakni, *pertama*, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, *kedua* relevansi, *ketiga*, *peningkatan kualitas* dan *ke empat*, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan (Natsir, 2002). Dimensi pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah. Strategi ini perlu mendapat prioritas karena ternyata banyak anak-anak di Indonesia, terutama di pedesaan masih banyak yang belum mengenyam pendidikan, terutama di tingkat SLTP. Di samping itu, masalah pemerataan pendidikan menurut Hadikusum (1995:99) mencakup tiga aspek pokok, yaitu persamaan kesempatan, (*equality of opportunity*) aksesibilitas (*accessibility*), dan keadilan atau kewajaran (*equity*)

Pemerataan kesempatan berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi” Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Begitu pula dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak membedakan warga negara menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Aksesibilitas artinya setiap orang tanpa membedakan asal usulnya memiliki akses (kesempatan masuk)

yang sama kedalam pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan keadilan disini adalah perbedaan perlakuan pada peserta didik sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Secara moral-etis adalah adil dan wajar apabila peserta didik diperlakukan menurut kemampuan, bakat dan minatnya.

Langkah pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pemerataan pendidikan, yaitu dengan penancangan program wajib belajar sembilan tahun yakni Sekolah Dasar (SD) 6 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama 3 tahun. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia yang erat kaitanya dengan gerakan " melek " huruf dan masyarakat belajar.

Program wajib belajar sembilan tahun dianggap sebagai langkah yang strategis karena program ini merupakan awal bahwa manusia ditempatkan sebagai faktor terpenting untuk pengembangan kehidupan bangsa. Kebijakan pemerintah dalam penancangan program wajib belajar sembilan tahun dilandasi adanya konsep bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pendidikan formal memiliki andil yang sangat besar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa jika seseorang berpendidikan lebih tinggi tentu akan memiliki pengetahuan, kemampuan, serta tata nilai tertentu yang memungkinkan mereka lebih mampu menyerap berbagai informasi termasuk ilmu pengetahuan.

Pendidikan yang dimiliki seseorang mencerminkan tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pula kemampuan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi atau nilai-nilai baru.

Program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah merupakan kelanjutan dari program-program pendidikan sebelumnya. Program pendidikan dengan penekanan pada peningkatan sumber daya manusia sebenarnya telah dimulai tahun 1983 dengan penancangan wajib belajar enam tahun, yakni untuk usia 7 – 15 tahun secara nasional. Suksesnya Program tersebut akhirnya memotivasi pemerintah untuk melanjutkan program wajib belajar menjadi sembilan tahun sejak tahun 1994 yang lalu. Program tersebut sekaligus untuk menjawab dinamika perkembangan zaman yang terus berkembang.

Program wajib belajar sembilan tahun sifatnya anjuran, tetapi program ini hendaknya memiliki kekuatan yang mampu mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pada gilirannya program ini mampu menuntaskan kesempatan kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan sampai jenjang SLTP. Sementara itu, orang tua yang memiliki anak usia sekolah dianjurkan, bahkan diwajibkan menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang tersebut. Meskipun para orang tua yang tidak mengindahkan program ini tidak mendapatkan sanksi hukum, diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral untuk menyukseskan program ini. Tanggung

jawab moral ini tidak semata-mata untuk pendidikan anaknya, tapi juga menyangkut tanggung jawab sebagai warga negara yang harus berpartisipasi dalam pembangunan.

Nilai budaya yang berlaku di masyarakat atau yang dianut seorang anggota masyarakat akan berpengaruh terhadap pendidikan, terutama dalam memandang nilai anak. Nilai yang di maksud disini adalah hal-hal yang di anggap baik dan di yakini. Nilai juga dipandang sebagai kaidah hidup seseorang sehingga sesuatu yang di anggap baik akan selalu dihargai, dipelihara, dan di agungkan dalam mengambil keputusan. Nilai yang merupakan kaidah hidup seseorang akan tercermin melalui pola pikir, aspirasi, persepsi, dan bertindak (Kaswardi, 1998:7).

Faktor berikut yang dapat mempengaruhi partisipasi program wajib belajar sembilan tahun adalah persepsi orangtua tentang pendidikan, Persepsi orangtua terhadap pendidikan akan mempengaruhi aspirasi. Artinya, kemampuan orangtua dalam melihat pentingnya pendidikan akan berpengaruh pada harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang dimaksud aspirasi disini adalah keinginan, harapan, atau cita-cita orangtua terhadap tingkat pencapaian pendidikan anak-anaknya.

Selain faktor yang sifatnya perspektif, ada latar belakang lain yang mendasari pemerintah untuk mencanangkan program wajib belajar 9

tahun, antara lain faktor geografis, perekonomian keluarga, tradisi masyarakat, dan sarana prasarana pendidikan.

Faktor geografis yang mendasari karena adanya kenyataan bahwa rakyat Indonesia tersebar di berbagai wilayah yang luar biasa luasnya dan tersebar pada ribuan pulau di seluruh tanah air. Dengan tersebarnya pulau-pulau, mereka sebagian masih hidup secara berkelompok dengan pola hidup yang sederhana dan pandangan yang tradisional. Oleh karena itu sebagian besar mereka yang tinggal di daerah terpencil kurang memperhatikan pentingnya pendidikan. Keadaan seperti ini merintangai tersebarluasnya kesempatan pendidikan secara merata. Dengan demikian, tidak mengherankan jika ada suatu kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan pendidikan ke jenjang SLTP, bahkan sebagian lagi ada yang belum lulus SD. Masalah ini bukan karena anak tidak mau, tapi karena letak tempat tinggal mereka yang tidak mungkin dijangkau sarana pendidikan. Wilayah seperti itu seringkali tidak memungkinkan berlangsungnya usaha pendidikan secara baik, disamping faktor geografis juga usaha menanamkan pengertian tentang pentingnya pendidikan karena pola hidup yang terbelakang.

Berdasarkan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia 80 % sebagian besar adalah masyarakat petani, namun sebenarnya jumlah tersebut hanya sebelas juta kepala keluarga yang mempunyai tanah sekitar setengah hektar, enam juta kepala keluarga hanya seperempat

hektar, bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah garapan atau sebagian hanya buruh tani (Sastrosupono, 1984:18). Dengan kondisi seperti itu kondisi perekonomian mereka tentu saja masih banyak dijumpai keluarga prasejahtera. Padahal rata-rata mereka mempunyai anak tiga atau lima sehingga sebagian besar mereka dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin.

Tersendatnya dan tak terjangkaunya masyarakat dari masalah pendidikan ternyata juga disebabkan oleh tradisi masyarakat yang terbelakang. Paling tidak fenomena di lokasi penelitian, menunjukkan hal tersebut. Contoh di Distrik Semangga Kabupaten Merauke, terdapat anggapan masyarakat bahwa menyekolahkan anak akan merugikan keluarga. Alasannya adalah dengan sekolah anak-anak akan malas kerja, tak lagi dapat membantu orang tua di sawah atau ladang atau pekarangan, menjadi pandai dan akhirnya berani pada orangtua, atau bersekolah akhirnya juga akan menganggur karena mencari pekerjaan amat sulit, sementara banyak sarjana yang masih nganggur.

Alasan seperti ini selalu mewarnai pola pandang para masyarakat pedesaan yang pekerjaanya sebagai petani, khususnya di Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Sebagai masyarakat petani tenaga kerja sangat penting, anak-anak juga merupakan tenaga kerja bagi keluarga yang bersangkutan. Tradisi bertani, berladang, dan bercocok tanam lainnya melahirkan suatu kebiasaan menggunakan anak istri sebagai

tenaga kerja murah. Dengan demikian, akhirnya anak akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan bersekolah.

Perkembangan berikutnya memang mereka mengerti tentang perkembangan zaman. Akan tetapi, mereka masih tetap beranggapan bahwa asal anak-anak mereka sudah bisa membaca dan menulis masalah sekolah sudah cukup dan tidak perlu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan anak perempuan akan lebih parah lagi keadaannya, mereka tidak mendapatkan kesempatan seluas anak laki-laki. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan disekolahkan tidak ada manfaatnya sebab biarpun bersekolah tinggi akhirnya akan kembali juga, yaitu tugasnya sebagai istri yang harus di dapur dan beranak. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau di daerah di pedesaan yang sebenarnya masih dalam usia sekolah terpaksa harus dinikahkan. Ditambah lagi adanya alasan bahwa tanggung jawab keluarga adalah laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga, sementara pihak perempuan hanya mengikuti saja.

Ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar 9 tahun, yaitu (1) lebih dari 80 persen angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat; (2) program wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi; (3) semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; (4) dengan peningkatan program wajib belajar dari 6 ke 9

tahun, akan meningkatkan kematangan dan keterampilan siswa; (5) peningkatan wajib belajar menjadi 9 tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 ke 15 tahun (Daliyo, 2004:2)

Ada empat kendala yang sudah di antisipasi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan program wajib belajar 9 tahun, yaitu (1) secara kuantitatif target yang harus dikejar sangat besar terutama karena besarnya jumlah lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SLTP; (2) tingkat partisipasi sekolah pada usia SLTP rendah dibandingkan dengan usia SD; (3) tingkat meneruskan dari SD ke SLTP rendah, disamping rendahnya tingkat *drop out* baik di SD maupun SLTP ; (4) besarnya jumlah lulusan SD yang tidak meneruskan ke SLTP membutuhkan bantuan pemerintah untuk bisa memasuki pasar kerja (Daliyo, 2004 : 5).

Pencapaian sasaran program wajib belajar 9 tahun, pemerintah telah menyusun strategi, antara lain meningkatkan jumlah dan daya tampung SLTP, mengangkat guru baru, menyediakan lebih banyak sarana belajar, mengajukan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, membebaskan uang sekolah dan mensubsidi sekolah swasta. Strategi lainnya yang lebih penting adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan alternatif. Strategi pendidikan alternatif ini didasarkan atas adanya pertimbangan bahwa meskipun kapasitas sekolah telah ditingkatkan, masih banyak anak usia sekolah

yang belum tertampung, antara lain karena kondisi perekonomian keluarga yang kurang mampu.

Sistem pendidikan alternatif, disamping di implementasikan melalui sekolah biasa, dilakukan beberapa tipe nonkonvensional. Sekolah nonkonvensional ini adalah : (1) SMP kecil, yang dibangun untuk daerah terpencil atau yang jarang penduduknya; (2) SMP terbuka, untuk anak-anak usia SMP yang tidak mampu masuk SMP biasa; (3) Program Paket A dan Paket B yang setarap SMP (tanpa mengenal batas umur); (4) sekolah-sekolah agama yang disamakan tarafnya dengan SMP umum.

Berbagai strategi telah diterapkan dan berbagai kemungkinan kendala yang menghambat juga telah diantisipasi. Namun demikian, gerakan wajib belajar 9 tahun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi gambaran jumlah anak putus sekolah masih sangat besar dibandingkan mereka yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian tahun 2006-2007 data angka putus sekolah SD /MI adalah sebesar 30.63 % sedangkan untuk SLTP dan MTS sebesar 32,45 (*Sumber: PDIP-Balitbang, Depdiknas*)

Alasan lain yang melatar belakangi penulis mengangkat masalah ini adalah bahwa berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data pada tahun 2007 jumlah anak usia sekolah (7-15) di Distrik Semangga Kabupaten Merauke sebagaiberikut :

TABEL 1
KEADAAN ANAK USIA SEKOLAH (7-15)
DISTRIK SEMANGGA KAB. MERAUKE
TAHUN 2007

Jumlah Penduduk : 11.133
Jumlah KK : 2.920
Jumlah Anak Usia Sekolah (7 – 15) : 1.837

NAMA KAMPUNG	Anak Tidak Tamat SD	Anak Tamat SD	Anak Tidak Melanjutkan SLTP	J u m l a h
Waninggap kai	25	124	37	186
Muram sari	29	174	40	243
Margamulya	27	132	35	194
Semangga Jaya	21	204	36	261
Kuper	12	73	22	107
Kuprik	20	152	51	223
Sidomulyo	17	149	29	195
Urumb	22	89	34	145

Matara	32	86	43	161
Waningsanggo	18	78	26	122
	223 (12,13 %)	1261(68,64%)	353 (19,21%)	1.837(100%)

Sumber : Data Monografi Distrik Semangga (2007)

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa anak usia sekolah (7-15) di Distrik Semangga Kabupaten Merauke yang berjumlah 1.837 masih ditemukan anak yang tidak tamat SD dan tidak melanjutkan ke jenjang SLTP. Anak yang tidak tamat SD berjumlah 223 (12,13%) dan anak yang tidak melanjutkan ke SLTP 353 (19,21%) . Hal ini berarti masih 31 % lebih anak yang tidak melanjutkan pada jenjang SD dan SLTP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun masih belum memenuhi sesuai apa yang diharapkan.

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa anak yang tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama masih tinggi yaitu sekitar 31 % lebih. Berdasarkan kondisi tersebut maka penulis akan melakukan penelitian tentang " Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Distrik Semangga).

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

B.1. Identifikasi Masalah

Program wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu program pemerintah untuk tetap mempertahankan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa dan negara. Namun demikian masih terkendala dalam berbagai aspek dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut nampak dari identifikasi masalah mulai dari tingkatan nasional sampai di lokasi penelitian berikut :

1. Di kancah internasional data UNDP tentang *Human Development Index* (HDI) menunjukan dari 174 negara, Indonesia berada pada posisi kurang mengembirakan yakni peringkat 110
2. Secara nasional, faktor geografis mendasari keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut karena rakyat Indonesia tersebar di berbagai wilayah yang tersebar pada ribuan pulau di seluruh tanah air. Dengan tersebarnya pulau-pulau, sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup secara berkelompok dengan pola hidup yang sederhana dengan pandangan yang tradisional. Oleh karena itu sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah terpencil kurang memperhatikan pentingnya pendidikan. Keadaan seperti ini

merintanginya tersebarluasnya kesempatan pendidikan secara merata.

3. Ada empat kendala yang sudah diantisipasi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan program wajib belajar 9 tahun, yaitu (1) secara kuantitatif target yang harus dikejar sangat besar (minimal 95% Target APK 2008) terutama karena besarnya jumlah lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SLTP; (2) tingkat partisipasi sekolah pada usia SLTP rendah (60,19%) dibandingkan dengan usia SD (94,57%) ; (3) tingkat meneruskan dari SD ke SLTP rendah, disamping rendahnya tingkat *drop out* baik di SD maupun SLTP ; (4) besarnya jumlah lulusan SD yang tidak meneruskan ke SLTP membutuhkan bantuan pemerintah untuk bisa memasuki pasar kerja, berdasarkan data PDIP-Balitbang, Depdiknas 2006 lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SLTP sebesar 50,24%.
4. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi gambaran jumlah anak putus sekolah masih sangat besar dibandingkan mereka yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian tahun 2006-2007 data angka putus sekolah SD /MI adalah sebesar 30.63 % sedangkan untuk SLTP dan MTS sebesar 32,45
5. Masih tingginya angka partisipasi lulusan sekolah untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut. Masih ada 31 % lebih anak yang tidak melanjutkan pada jenjang SD dan SLTP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan program wajib

belajar sembilan tahun masih belum memenuhi sesuai apa yang diharapkan.

6. Berdasarkan kondisi di lapangan di duga masih terdapat pandangan masyarakat yang kurang mendukung terhadap peningkatan pendidikan di di Distrik Semangga Kabupaten Merauke.

B.2. Rumusan Masalah

Secara kusus permasalahan tersebut dapat penulis rinci sebagai berikut :

1. Apakah pandangan orangtua terhadap nilai positif anak terkait dengan partisipasi dalam mengikuti program pendidikan?
2. Apakah ketidak berhasilan program wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga Kabupaten Merauke dipengaruhi oleh persepsi orangtua tentang pendidikan ?
3. Apakah ketidakberhasilan program wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga Kabupaten Merauke dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi orangtua ?
4. Faktor-faktor lain apakah (selain yang telah diduga sebelumnya) yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat pada pendidikan dasar di Distrik Semangga Kabupaten Merauke? atau aspek apa saja yang dianggap sebagai pendukung dan pendorong pelaksanaan program Wajar di Semangga Kabupaten Merauke?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai secara umum adalah untuk mengetahui pengaruh pandangan orangtua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi terhadap ketidakberhasilan program wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keterkaitan pandangan orangtua tentang nilai anak dengan partisipasi pada program wajib belajar sembilan tahun.
2. Untuk mengetahui keterkaitan persepsi orangtua tentang pendidikan dengan partisipasi pada program wajib belajar sembilan tahun.
3. Untuk mengetahui keterkaitan kondisi sosial ekonomi orangtua dengan partisipasi pada program wajib belajar sembilan tahun.
4. Untuk mengidentisikasi faktor-faktor lain yang dianggap terkait dengan partisipasi masyarakat pada program Wajar 9 tahun di distrik Semangga Kabupaten Merauke

D. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan secara umum penelitian ini dapat digunakan untuk memahami kendala partisipasi pendidikan orangtua pada jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah yang terjadi dalam latar belakang masyarakat desa. Di samping itu, temuan penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan yang bermakna bagi tim koordinasi wajib belajar pendidikan sembilan tahun sehingga dapat menentukan langkah dan tindakan dalam upaya meningkatkan partisipasi pendidikan. Sedangkan kegunaan penelitian secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini dapat memberikan informasi faktual pengaruh pandangan orangtua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi secara bersama-sama terhadap program wajib belajar sembilan tahun selain itu agar mereka ikut memikirkan dan mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.
2. Bagi orangtua, penelitian ini dapat memberikan masukan agar mereka mengubah pandangannya tentang nilai anak dan visi pendidikan demi menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Partisipasi Masyarakat pada Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diyakini banyak pihak telah menjadi kata kunci dalam pengembangan pembangunan di era otonomi daerah sekarang ini. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat ternyata telah gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi merupakan jembatan penghubung antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan dengan masyarakat yang memiliki hak sipil, politik dan social ekonomi masyarakat. (eko, 2003: 8).

Dengan partisipasi masyarakat, posisi tawar masyarakat di mata pemerintah menjadi meningkat, masyarakat tidak selalu di dikte dan di dominasi oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan atau keputusan dalam pembangunan lingkunganya namun selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaanya.

Konsep partisipasi merupakan suatu konsep yang luas, dan penting, karena salah satu indikator keberhasilan suatu

pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Bintoro Tjokroamidjojo (1989:207-208) memberikan pendapat bahwa “ partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977:8) menyatakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan terdiri dari :

- 1). Pengambilan keputusan.
- 2). Implementasi
- 3). Pemanfaatan (*Benefits*)
- 4). Evaluasi Program Pembangunan

Untuk memahami secara jelas dan terperinci mengenai tahapan-tahapan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan penulis akan menguraikan tahapan partisipasi dimaksud.

- 1). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk menentukan arah dan strategi pembangunan disesuaikan dengan sikap dan budaya masyarakat setempat.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses dalam memilih alternatif yang diberikan oleh semua unsur masyarakat, lembaga-lembaga sosial dan lain-lain. (Siagian, 1972: 108) .

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses rencana pembangunan , biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bertujuan untuk memilih alternatif dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.

2). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Berhasilnya suatu program pembangunan tergantung dari keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi seluruh .

Koentjaraningrat, menyatakan bahwa partisipasi rakyat, terutama rakyat pedesaan dalam pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda yaitu :

- a. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek pembangunan yang kusus. Dalam tipe yang pertama, rakyat pedesaan diajak, diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya fisik. Kalau rakyat ikut sertaberdasarkan atas keyakinanya bahwa proyek itu akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas , tanpa mengharap

upah yang tinggi. Sebaliknya, kalau mereka hanya diperintah dan dipaksa oleh atasan untuk menyumbangkan tenaga atau harta bendanya kepada proyek tadi, maka mereka tidak akan turut berpartisipasi dengan semangat tadi. Contoh. Partisipasi orang desa dalam pembangunan jalan, membuat saluran irigasi.

b. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan. Dalam tipe partisipasi ini tidak ada proyek aktivitas bersama yang khusus, tapi masuk termasuk proyek pembangunan, tidak bersifat fisik dan tidak memerlukan perintah atau paksaan dari atasannya, tetapi berdasarkan kemauan mereka sendiri. Contoh partisipasi dalam kegiatan KB.

3). Partisipasi dalam menerima hasil atau manfaat pembangunan.

Menurut Cohen dan Uphop banyak cara untuk mengklarifikasikan dan menganalisis manfaat-manfaat dari hasil pembangunan. Dari segi distribusi dapat dilihat pada jumlah maupun kualitas manfaat. Dari segi lain dapat dibedakan antara *material benefit* dan *social benefits*. *Material benefits* dalam menganalisa akan berhubungan dengan konsumsi atau pendapatan, kekayaan, sedangkan

social benefits seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, jalan-jalan, fasilitas transportasi. (1977: 47)

4) Partisipasi masyarakat dalam menilai pembangunan.

Menurut Cohen dan Uphoff , membedakan tiga jenis evaluasi :

- a. *Project Contered Evaluation.*
- b. *Political Activities.*
- c. *Public Opinion Efforts.*

Project Contered Evaluation, bila evaluasi ini dipandang sebagai proses evaluasi formal, sedangkan dalam *Political Activities* berkaitan dengan pemilikan anggota-anggota parlemen rakyat setempat atau pemimpin setempat. *Public Opinion Efforts*, opini publik dalam mengevaluasi suatu program tidak secara langsung, melainkan mempengaruhi melalui mass media/surat kabar. Misal : melalui surat pembaca dalam mengungkapkan beberapa gagasan (1977: 56-58)

Sehubungan dengan pendekatan partisipasi, Cub Du Sahel (dalam Mikkelsen,2001:69-70) mendeskripsikan pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan partisipasi sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2

Pendekatan - Pendekatan Partisipasi
Club Du Sahel , 1988

No	Jenis Partisipasi	Pendekatan	Keterangan
1	Partisipasi pasif, pelatihan dan informasi	Pendekatan” kami lebih tahu apa yang baik bagimu”	Komunikasi satu arah seperti antara guru dan murid yang diterapkan antara staff proyek dan masyarakat.
2	Partisipasi aktif	Pendekatan pelatihan dan Kunjungan”.	Dialog dan komunikasi dua arah memberikan lepada masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dengan petugas penyuluh dan pelatih dari luar.
3	Partisipasi dengan keterikatan.	Pendekatan”kontak, tugas yang dibayar”. Bila anda melakukan ini, maka proyek akan melakukan itu.	Masyarakat setempat, baik sebagai pribadi ataupun kelompok kecil, diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggung jawab atas setiap kegiatan pada masyarakat atau proyek. Model ini memungkinkan untuk beralih dari model klasik kepada model yang diberi subsidi, dimana panitia setempat bertanggung jawab atas pengorganisasian dan pelaksanaan tugas. Manfaatnya: dapat dibuat modifikasi seiring yang di inginkan.
4	Partisipasi atas permintaan setempat	Kegiatan yang didorong oleh permintaan	Kegiatan yang berfokus untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat, bukan

			<p>kebutuhan yang dirancang dan disuarakan pihak luar. Kegiatan bukanlah proyek yang tipikal: tidak ada sarana untuk suatu periode tertentu, tidak ada rencana dan struktur proyek dan tidak ada komando satu arah dari proyek kepada kelompok sasaran. Masalahnya : Bagaimana masyarakat setempat dapat memberi perhatian terhadap sesuatu yang baru dan berbeda, apabila sebelumnya mereka tidak mengetahui apapun mengenai apa yang akan terjadi.</p>
--	--	--	--

Sumber: Club Du Sahel (dalam Mikkelsen, 2001 : 69-70)

b. Perilaku Partisipasi Masyarakat

Dalam menerima kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat dituntut dapat memahami, menghayati, dan melaksanakannya sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, keterlibatan atau partisipasi masyarakat amatlah dibutuhkan demi terciptanya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1994

tentang program wajib belajar sembilan tahun, merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia tujuh sampai dengan limabelas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar .

Sondang P. Siagian (Khairuddin, 1992: 125) tentang mengemukakan pentingnya partisipasi masyarakat, yakni : ” Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena itu pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan”.

Menurut Winardi (1990:202), ” partisipasi secara formal dapat didefinisikan sebagai : keikutsertaanya seseorang, baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan berada dan orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut”. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa keterlibatan masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosional, lebih dari keterlibatan fisik. Keterlibatan secara mental berarti keterlibatan sebagai suatu kebiasaan hidup di suatu

lingkungan tertentu. Sedangkan keterlibatan secara emosional berarti keterlibatan yang benar-benar dirasakan, yang timbul dari hati atau perasaan seseorang sebagai kepentingan bersama.

Menurut Allport (dalam Sastropoetro, 1988:12) menyebutkan” seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya atau egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja”. Selanjutnya disebutkan bahwa dengan keterlibatan seseorang dalam kegiatan tertentu menunjukkan bahwa perasaannya berkenaan atau menyetujui untuk melaksanakan dan pikiranya menunjang bahwa seseorang perlu melaksanakan kegiatan tersebut.

Senada dengan Allport, Adi (2001: 206) menyatakan bahwa partisipatif aktif masyarakat dalam program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama, yang dapat diwujudkan dengan strategi penyadaran. Untuk keberhasilan program dimaksud, maka warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis, tetapi juga keterlibatan emosional pada program tersebut.

Pandangan lainnya, sebagaimana dinyatakan Keith Davis (dalam Sastroputranto, 1982 : 13)

Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha mencapai tujuan yang bersangkutan.

Dalam memutuskan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam berpartisipasi dibutuhkan adanya perilaku dari masyarakat itu sendiri. Setiap individu dalam berperilaku sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks diantaranya adalah faktor fisiologis seperti keadaan dan kemampuan fisik serta mental seseorang, faktor psikologis seperti persepsi, sikap, kepribadian, intelegensi, motivasi, faktor lingkungan seperti keluarga, kebudayaan, label yang melekat pada diri seseorang seperti status sosial, harga diri, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, Maramis (1998: 61) mengatakan bahwa manusia sebagaimana ia berada pada sesuatu waktu dalam berperilaku merupakan hasil suatu interaksi badan (bio/somato), jiwa (psico) dan lingkungan (sosio). Ketiga unsur ini saling mempengaruhi dan tidak boleh terpisahkan antara unsur yang satu dengan yang lain, akan tetapi harus memperhatikan serta

mempertimbangkan ketiga-tiganya sebagai suatu keseluruhan.

- o Unsur bio / somato : Keadaan badanian atau jasmaniah.
- o Psico : Kesadaran, afek dan emosi, proses berfikir (persepsi), kepribadian, dan motivasi.
- o Sosio : Lingkungan

Lebih lanjut, Gibson (1989: 52) mengemukakan bahwa variabel-variabel penentu seseorang dalam berperilaku, adalah sebagai berikut :

- a. Variable fisiologi : Kemampuan fisik dan mental.
- b. Variable Psikologis : Persepsi, sikap, kepribadian , belajar dan watak.
- c. Variable lingkungan : Keluarga, kebudayaan, kelas social.

Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah :
Pertama : bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan

demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. *Kedua* : status partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkret peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam generasi bagi tidak di abaikannya kepentingan masyarakat. *Ketiga* : bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Dari dasar itulah dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah akan terlihat dari perilaku mendukung dan melaksanakan kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan.

c. Faktor-Faktor yang terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun.

1). Pengetahuan / pandangan orangtua tentang nilai anak.

Sistem nilai budaya merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan suatu masyarakat karena sistem nilai budaya banyak berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku warga dalam rangka

menanggapi situasi sekitarnya. Tentang sistem nilai budaya Koentjaraningrat (1984) berpendapat bahwa sistem nilai budaya ialah konspisi-konsepsi yang hidup di alam pikiran sebagian warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Berdasarkan pendapat tersebut, suatu sistem nilai budaya juga dapat dipandang sebagai suatu yang memberikan patokan tentang hal-hal yang baik atau buruk, benar atau salah, dan mengenai apa yang di anggap penting dan tidak berharga dalam hidup.

Nilai budaya yang berlaku di masyarakat atau yang dianut seorang anggota masyarakat akan berpengaruh terhadap pendidikan, terutama dalam memandang nilai anak. Nilai yang di maksud disini adalah hal-hal yang di anggap baik dan di yakini. Nilai juga dipandang sebagai kaidah hidup seseorang sehingga sesuatu yang di anggap baik akan selalu dihargai, dipelihara, dan di agungkan dalam mengambil keputusan. Nilai yang merupakan kaidah hidup seseorang akan tercermin melalui pola pikir, aspirasi, persepsi, dan bertindak (Kaswardi, 1998:7).

Di dalam pembicaraan masalah nilai anak, kita akan dihadapkan pada masalah yang sangat luas karena beragamnya argumentasi, generalisasi, perhitungan, dan pengecualian yang dijumpai dalam persoalan makna nilai anak. Nilai anak dapat didekati dengan berbagai sudut pandang si pemakna, misalnya saja (Hull,1977:12) membedakan nilai anak menjadi lima konsep dasar, yaitu (1) harga anak yang banyak berhubungan dengan masalah kepuasan orangtua, (2) biaya anak yang dikeluarkan untuk membesarkan anak, (3) penghasilan yang berhubungan dengan sumber-sumber kesejahteraan anak, dan (4) keuntungan dari seorang anak yang berhubungan dengan hasil yang dihadapinya.

Harga anak yang banyak berhubungan dengan masalah kepuasan orangtua artinya orangtua yang telah memiliki anak merupakan suatu bentuk kesempurnaan hidup yang akan melangsungkan kelestarian generasinya. Orangtua akan merasa puas apabila telah berkeluarga dan cepat di karuniai anak. Demikian pula setelah anak itu besar, orangtua akan merasa puas apabila anak tersebut menjadi anak yang rajin dan penurut dalam arti rajin membantu orang

tua dalam bekerja. Orangtuapun akan menjadi puas apabila setelah anaknya berkeluarga dia mampu memberikan warisan yang cukup kepada anaknya.

Nilai yang berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membesarkan anak, maksudnya adalah berapa besar biaya yang harus ditanggung orang tua semenjak lahir hingga dia mampu mencari nafkah sendiri. Oleh karena itu, setelah anak bersekolah akan juga dihitung biaya yang dikeluarkan dan bagaimana hasilnya nanti setelah lulus apakah untung atau rugi, setelah lulus nanti dalam arti penghasilan yang diperolehnya dibandingkan dengan biaya sekolah yang telah dikeluarkan.

Anak yang mampu memberikan kontribusi penghasilan kepada keluarga atau orang tua dianggap anak yang berhasil atau memiliki nilai positif. Oleh karena itu, nilai anak akan ditentukan mampu tidaknya anak menambah penghasilan keluarga atau memberikan sebagian penghasilannya kepada orang tua setelah berkeluarga.

Keuntungan dari seorang anak yang berhubungan dengan hasil yang didapatkannya maksudnya anak merupakan suatu aset untuk

menambah penghasilan. Setelah anak-anak tersebut dianggap dapat bekerja dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk bekerja atau membantu orangtua dalam meningkatkan penghasilan. Dengan demikian, keberadaan anak akan memberikan keuntungan yang berarti setelah mampu memberikan kontribusi kepada keluarga.

Konsep yang disampaikan Hull (1977:14) tersebut ditinjau dari sudut pandang ekonomi sehingga nilai seorang anak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi sehingga nilai anak dilihat dari hasil, keuntungan bersih yang tersisa setelah dikurangi ongkos pemeliharaan anak.

Konsep lain berdasarkan pendekatan psikososial dengan latar belakang pendekatan fungsional (*functions and disfunction*). Nilai anak dapat dibagi menjadi (1) nilai positif, meliputi fungsi nilai kepuasan, kebaikan, dan keuntungan, (2) nilai negatif, yang meliputi gangguan *disvalues* (ongkos), beban, kesulitan, dan kerugian (Simon, 1977: 35).

Dalam kehidupan di pedesaan, sebagai nilai positif anak, anak memegang peranan penting dalam membantu memutar roda ekonomi rumah tangga

orang tuanya berupa bantuan kerja. Adapun bantuan kerja yang di manfaatkan apabila di lihat dari jenis pekerjaan rumah tangga untuk setian hari, menurut penelitian Sugito (1976), rata-rata anak laki-laki menyumbang 0,29 jam dan sumbangan anak perempuan sebanyak 0,24 jam. Namun, di luar jenis pekerjaan rumah tangga terkadang ada yang memanfaatkan anak bekerja untuk memperoleh hasil atau upah. Adanya kecenderungan mempekerjakan anak berarti mengorbankan kesempatan pengembangan pendidikan anak.

Disisi lain dalam konteks budaya kita, anak merupakan tabungan masa depan orangtua. Bila orangtua berhasil menyekolahkan anak lebih tinggi dan hidupnya akan sejahtera, akan berdampak pula pada kehidupanya di masa mendatang bahkan akan merambah pula pada hadai taulanya. Hal senada ditegaskan oleh Singarimbun (1977 : 28)

” Nilai positif anak yang paling sering di ungkapkan oleh responden adalah bantuan ekonomi dalam bentuk kerja (baik di rumah, dalam pekerjaan orang tua atau pertanian) dan juga jaminan di hari tua, sedangkan nilai negatif yang paling menonjol adalah beban ekonomi termasuk biaya sekolah.”

Dengan demikian, nilai positif anak adalah manfaat anak bagi orangtua atau keluarga, sedang nilai negatif anak adalah beban atau biaya yang harus ditanggung oleh orangtua atau keluarga untuk memelihara dan membesarkan anak, yang meliputi biaya hidup dan biaya sekolah anak.

Kartoyo (1983: 46) menegaskan adanya onkos-ongkos yang langsung dikeluarkan orangtua guna membesarkan anak tersebut, misalnya untuk keperluan sandang, papan, pendidikan, dan lain-lain akan merupakan aspek kerugian (*disutility*) bagi orangtua. Dalam Hubungan ini Hull (1977:14) membedakan antara harga dan ongkos anak. Harga anak adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk anak guna membiayai kehidupannya. Ongkos anak adalah jumlah uang yang benar-benar dikeluarkan untuk membiayai anak. Jadi, harga anak itu merupakan konsep yang sebaiknya dilakukan, adapun ongkos anak merupakan kenyataan.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga hal yang dapat dipandang sebagai manfaat yang dapat diperoleh orangtua dari anak, yaitu anak sebagai

faktor konsumsi, produksi, dan tabungan (Kartoyo, 1983 : 46). Manfaat konsumtif bagi orangtua, yaitu sebagai pencurahan kasih sayang, kebanggaan, dan sumber kepuasan orang tua. Suksesnya seorang anak akan dapat memberikan kepuasan kepada orangtua yang bersangkutan. Manfaat produktif untuk membantu pekerjaan orangtua atau membantu mendatangkan penghasilan bagi orangtua, sedangkan manfaat bagi tabungan yaitu kegunaan untuk menjamin hari tua orangtua.

Sehubungan dengan beragamnya nilai anak yang disampaikan diatas sebenarnya tiap nilai memiliki ukuran dan bobot yang berbeda-beda. Menurut Csheler yang dikutip oleh Kaswardi (1998:37) pada hakekatnya nilai memiliki hierarki atau tingkatan sebagai berikut :

- (1) Nilai-nilai kenikmatan, artinya nilai yang berhubungan dengan hal hal yang mengenakan atau tidak mengenakan atau yang menyebabkan orang senang atau menderita.
- (2) Nilai-nilai kehidupan, nilai yang berhubungan dengan yang terpenting dalam kehidupan, termasuk nilai kesejahteraan.

- (3) Nilai-nilai kejiwaan, artinya nilai-nilai yang bersumber pada kebenaran filsafat. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran menurut masyarakat yang berpedoman pada pengetahuan filsafat.
- (4) Nilai-nilai kehormatan, artinya nilai yang berhubungan dengan modalitas yang suci dan tak suci yang bersumber dari Tuhan.

Berdasarkan uraian diatas konsep nilai anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga/keberadaan anak menurut pandangan orang tuanya. Apakah keberadaan anak hanya dilihat dari nilai positif (kepuasan, kebaikan, dan keuntungan), nilai negatif (gangguan, ongkos, beban kesulitan, dan kerugian) atau kedua-duanya.

2). Persepsi

Persepsi pada hakekatnya merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, perasaan, dan penghayatan (Walgito, 1994:8). Tak jauh dari pengertian tersebut , Young (1995: 59) memberikan

pengertian bahwa persepsi berkenaan dengan aktifitas panca indera, penafsiran, dan pemahaman objek, baik fisik maupun sosial. Demikian pula menurut Sudarmo dan Sudarto, (2001:16), bahwa persepsi merupakan suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus.

Berdasarkan pengertian diatas persepsi adalah proses mengetahui dan memahami dengan alat indera. Dalam persepsi terdapat tiga komponen utama, yaitu : (1) seleksi terhadap stimulus yang datang dari luar; (2) interpretasi, yaitu proses pengorganisasian informasi; (3) reaksi, bentuk tingkah laku akibat interpretasi.

Persepsi dipengaruhi oleh kerja sama faktor luar (*stimulus*) dan faktor dalam (*personal*). Faktor luar meliputi hal-hal yang berasal dari luar individu, seperti pendidikan, pengalaman, lingkungan sosial, dan lain-lain. Faktor dalam adalah semua yang berasal dari dalam individu, seperti cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Oleh karena itu, sesuai pendapat Soedarmo (1996:7) bahwa persepsi dapat berubah karena pengaruh pengalaman, teman, lingkungan, dan sebagainya. Demikian pula menurut Tjiptono dan

Anastasia (2000:16) bahwa persepsi merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan yang memiliki harapan.

Dari beberapa pengertian mengenai persepsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempersepsi individu mula-mula akan mengadakan pengamatan, kemudian mengadakan seleksi dari apa yang diamati. Setelah itu, baru mengadakan penafsiran dan kemudian baru mereaksi dalam bentuk tingkah laku. Dalam menyadari reaksi itu, seseorang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat dalam dirinya dan juga yang ada di luar dirinya. Faktor luar tersebut di antaranya lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Persepsi orangtua terhadap pendidikan akan mempengaruhi aspirasi. Artinya, kemampuan orangtua dalam melihat pentingnya pendidikan akan berpengaruh pada harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang dimaksud aspirasi disini adalah keinginan, harapan, atau cita-cita orangtua terhadap tingkat pencapaian pendidikan anak-anaknya.

Persepsi orangtua dengan melihat keberhasilan atau kegagalan yang dialami sebelumnya, baik yang dialami oleh dirinya sendiri maupun dialami oleh orang lain akhirnya dijadikan cermin pengalaman bagi dirinya. Pengalaman seseorang yang dirasakan sebagai kesuksesan akan meningkatkan aspirasinya dan disinilah orang tua akan memiliki persepsi bahwa pendidikan memiliki manfaat yang penting. Namun, jika pengalaman seseorang yang dirasa sebagai kegagalan aspirasinya akan turun drastis, bahkan orangtua akan memiliki persepsi bahwa pendidikan tak begitu bermanfaat.

Persepsi orangtua terhadap pendidikan anak dapat diamati dari cara orangtua itu menilai arti penting belajar bagi anak-anaknya dan dapat pula dilihat dari cara memahami nilai fungsional pendidikan bagi kehidupan masa depan anak-anaknya. Persepsi orang tua terhadap fungsi sekolah ialah anggapan atau pendapat orangtua sebagai pengamatan sehari-hari tentang sekolah.

Persepsi orangtua terhadap pendidikan anak merupakan suatu konsep pikir orangtua mengenai makna dan arti penting proses pendidikan anak-anak

mereka selepas pendidikan SD ; kaitanya dengan relevansi pendidikan serta biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Jika persepsi orangtua terhadap pendidikan baik akanmenopang munculnya aspirasi yang tinggi maka kesadaran untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi akan besar juga.

Persoalan lain yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah masalah klasik, yaitu persepsi orang tua di pedesaan yang menganggap bahwa pendidikan untuk anak wanita kurang begitu penting. Hal ini didasari adanya anggapan bahwa yang bertanggung jawab kelak setelah berumah tangga adalah pihak laki-laki, sehingga perempuan hanya membantu. Dengan demikian, tidak mengherankan kalau ada anak wanita di pedesaan yang masih banyak ditemukan sebelum lulus SLTP telah dinikahkan.

Bertolak dari uraian tersebut konsep persepsi orangtua tentang pendidikan adalah suatu pandangan orang tua dalam melihat konsep pendidikan. Artinya kemampuan orangtua dalam melihat visi dan manfaat pendidikan bagi anak.

3). Kondisi Lingkungan /Sosial ekonomi

Kondisi lingkungan orangtua meliputi kemampuan sosial ekonomi orangtua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Kemampuan ini ditunjukkan oleh latar belakang situasi sosial ekonomi orangtua.

Status sosial ekonomi yaitu kedudukan tertentu seseorang terhadap lainnya dalam suatu kelompok atau kelas masyarakat. Syarat menjadi anggota kelas masyarakat ialah menjalankan beberapa aktifitas ekonomi, bentuk dan jumlah pendidikan resmi, jumlah penghasilan, bentuk perumahan, dan lain-lain.

Permasalahan status sosial ekonomi yang dihadapi orangtua di daerah pedesaan tampaknya masih merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks yang pemecahannya banyak bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah setempat. Dunia pedesaan menurut Malassis (1981:105) masih ditandai dengan kemiskinan dalam bidang kebendaan, rendahnya pendapatan keluarga, rendahnya tingkat penanaman modal umum (seperti air dan listrik), dan persediaan keperluan hidup yang terbatas.

Status sosial keluarga (orangtua) yang rendah menyebabkan ketidakmampuan orang tua dalam memberikan fasilitas belajar yang memadai pada anak-anaknya. Perceraian yang terjadi dalam suatu keluarga dapat menimbulkan kasus anak berorang tua tunggal. Dampak negatifnya anak ikut salah satu ibu atau bapak, ikut nenek atau keluarga lain atau anak mempunyai ibu tiri.

Pendidikan rendah yang disandang orang tua menyebabkan tidak mampunya orangtua membantu anak apabila menghadapi kesulitan dalam pelajaran sekolah. Keadaan seperti itu sering kali menyebabkan anak mengalami ketegangan atau stres yang akhirnya dapat menimbulkan gangguan belajar. Gangguan belajar yang berkepanjangan akhirnya menyebabkan anak menjadi malas sekolah, bahkan akan putus sekolah.

Permasalahan keadaan sosial ekonomi ini tampaknya, di samping permasalahan aspirasi dan persepsi pendidikan orangtua, juga dapat mempengaruhi kelanjutan pendidikan anak. Seperti dikatakan Laurie dan Reif, yang dikutip Sudarto (1989:15) kemiskinan, yaitu taraf orang masih

berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan dasar. Masalahnya, orangtua dihadapkan pada kekurangan kemampuan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Kondisi sosial ekonomi yang lemah menyebabkan lemah pula kemampuan untuk menyekolahkan anak, apalagi untuk sekolah lanjutan yang berada di kota yang jauh dari tempat tinggal dan memerlukan biaya angkutan dan biaya lainnya yang tinggi.

Dengan demikian, masalah kesulitan ekonomi keluarga menyebabkan turunya kuantitas peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Ali Imron (1991:21) masalah ekonomi sering kali menimbulkan masalah sosial, seperti ketidak stabilan keluarga. Anak-anak mereka berkembang dalam budaya kemiskinan dan bahkan banyak di antaranya yang hidup tanpa harapan serta bersikap acuh tak acuh.

Di daerah pedesaan selain sarana pendidikan masih kurang, keadaan ekonomi masyarakat juga masih rendah. Hal ini dinyatakan oleh Gaffar (1990:19), bahwa penduduk pedesaan kebanyakan

hidup sebagai petani, nelayan, termasuk dalam katagori berpenghasilan rendah. Lebih lanjut Mubyarto (1992:13) menyatakan bahwa karena orangtua berpenghasilan rendah, anak-anak mereka yang berada pada usia muda sekalipun dorongan untuk turut meringankan beban hidup orangtua dengan jalan turut ambil bagian dalam upaya pertanian.

Kenyataan lain yang menunjukkan adanya peluang keikutsertaan dalam kegiatan perekonomian di perkotaan terkadang juga dapat mendorong anak memutuskan bahwa lebih baik memasuki pasaran kerja daripada melanjutkan sekolah. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Effendi (1992:87), bahwa anak-anak yang memasuki pasaran kerja tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat. Kalau tak ada kebijakan yang seksama, tidak tertutup kemungkinan tahun-tahun mendatang jumlah anak yang turut aktif dalam kegiatan ekonomi meningkat.

Di pedesaan, menurut Effendi (1992:87), keterlibatan anak laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar bila dibandingkan dengan perempuan. Proporsinya sekitar 57% dan 36%. Karena sudah

merasa bisa mendapatkan penghasilan sendiri melalui kegiatan ekonominya, anak enggan untuk sekolah.

Berpijak dari paparan tersebut yang dimaksud dengan konsep kondisi sosial ekonomi orang tua adalah kedudukan orang tua atau kelas orangtua dalam kehidupan masyarakat serta dilihat dari pendapatan dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Agar dapat memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu perlu mengetahui maksud yang terkandung didalamnya. Ada dua konsep utama yang harus dimengerti secara benar. *Pertama*, adalah konsep tentang implementasi dan *kedua*, adalah konsep tentang kebijakan publik. Namun, untuk memudahkan dalam memahami dua konsep besar itu (implementasi dan kebijakan publik) maka pembahasan konseptual tersebut akan dimulai dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan dan kemudian baru kedua konsep itu dipahami secara utuh.

Beberapa pendapat seperti dikemukakan oleh Harol D. Hasswell dan Abraham Kaplan (2001: 15) memberikan arti bahwa kebijakan sebagai " suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek yang terarah". Carl J. Friedrich (2000: 20)

mendefinisikan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan mengetahui hambatan-hambatannya dan kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program, peraturan perundang-undangan, atau tindakan-tindakan pemerintah lainnya.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk dilaksanakan agar tujuan tersebut dapat dicapai. Implementasi kebijakan menurut Kamus Webster berarti suatu proses melaksanakan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan dekrit presiden). Implementasi kebijakan itu sendiri harus menyediakan sarana untuk melaksanakannya sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut Lester James P. (1987:19) implementasi kebijakan publik dapat dikonseptualisasi sebagai suatu proses suatu hasil (*out put*

) dan sebagai suatu akibat (*out comes*) sebagai proses atau suatu rangkaian keputusan atributif awal dari legislatif pusat kedalam suatu akibat. Dengan demikian , ciri esensial dari proses implementasi adalah *performance* yang tepat waktu dan memuaskan. Sebagai hasil, implementasi menyangkut tingkatan seberapa jauh tujuan yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan dan sebagai akibat, implementasi mengandung implikasi adanya beberapa perubahan yang dapat di ukur dalam masalah besar yang menjadi sasaran program atau kebijakan. Lebih tegas dikatakan oleh A. Mazmanian dan Paula A. Sabatier (Wahab 1997: 21) implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya hanya menyangkut badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung

mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya dapat berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Adapun teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1994) menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya teori ini juga menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi. Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi. Oleh karena itu, kedua ahli ini membuat tipologi kebijakan menurut jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dalam jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Selanjutnya hubungan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling

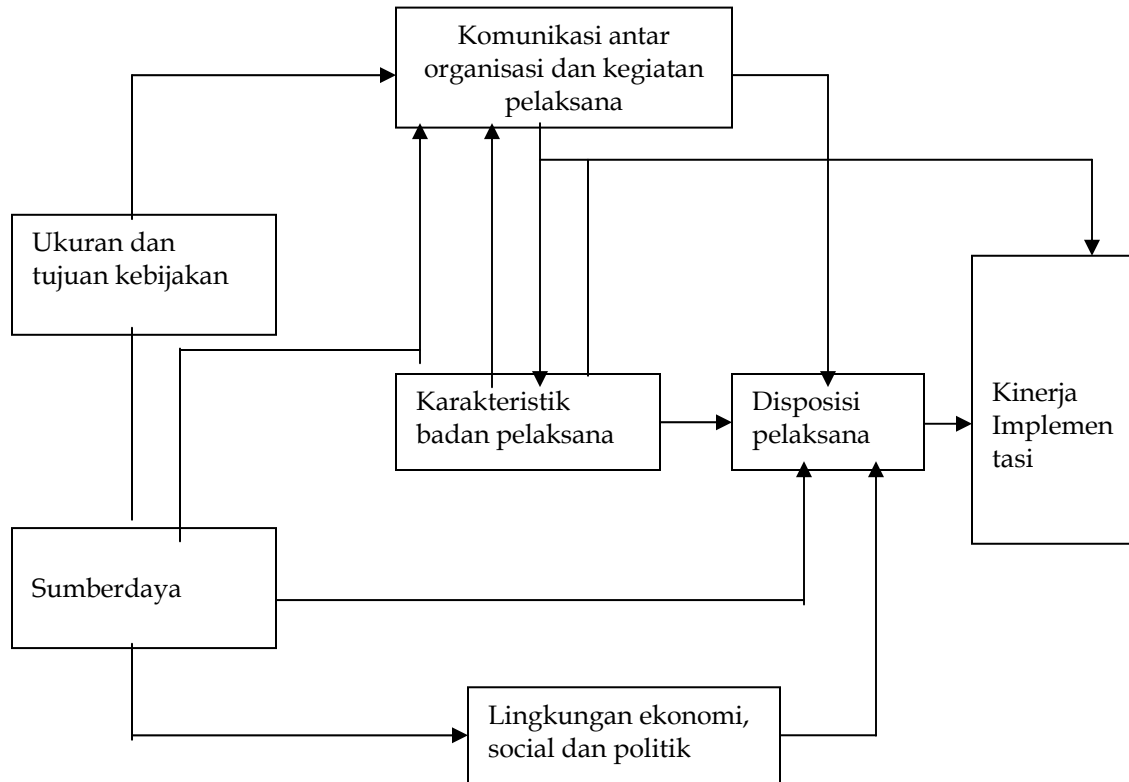
berkaitan, yaitu : (1) standar dan sasaran kebijaksanaan ; (2) sumber daya ; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) hubungan antar organisasi ; (5) kondisi sosial , politik dan ekonomi.

1. Standar dan Sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu didukung dengan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non- manusia (*non human resources*) . Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.
3. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
4. Hubungan / komunikasi antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan

koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan ; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan ; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Gambar. 1
Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn



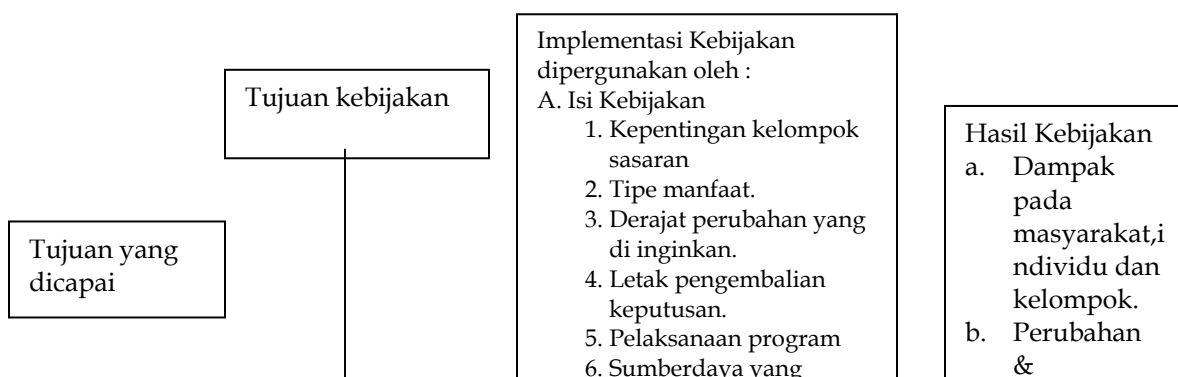
Sumber : Van Meter dan Van Horn 1994

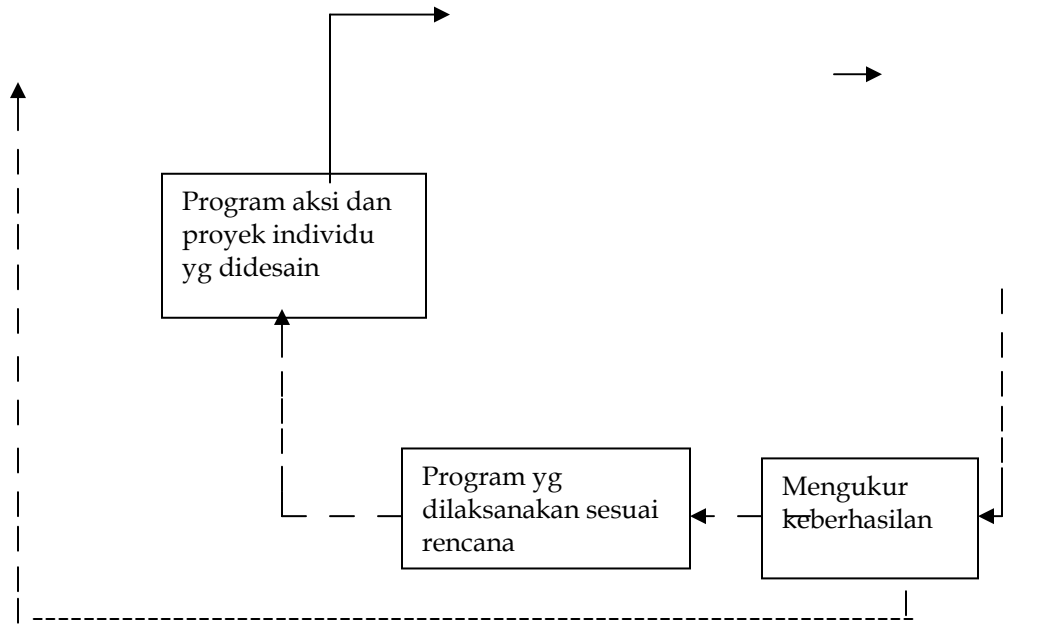
Menurut Grindle (dalam Wibawa, 1994:22) implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan atau dalam studi implementasi akan melihat adanya dimensi atas suatu organisasi, yaitu tujuan, pelaksanaan tugas dan kaitan organisasi tersebut dengan lingkungan. Adapun yang menjadi ide dasar dari pemikiran tersebut adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Akan tetapi, hal ini tidak lah selalu berjalan mulus, tergantung *implementability* dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle di pengaruhi oleh dua variabel besar , yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) seperti terlihat pada gambar berikut ini, Variabel isi kebijakan ini mencakup : (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target groups* ; (3) sejauh mana perubahan yang di inginkan dari sebuah kebijakan . Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan prilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit di implementasikan daripada sekedar program yang memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin. ; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci ; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup : (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Gambar . 2
Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle



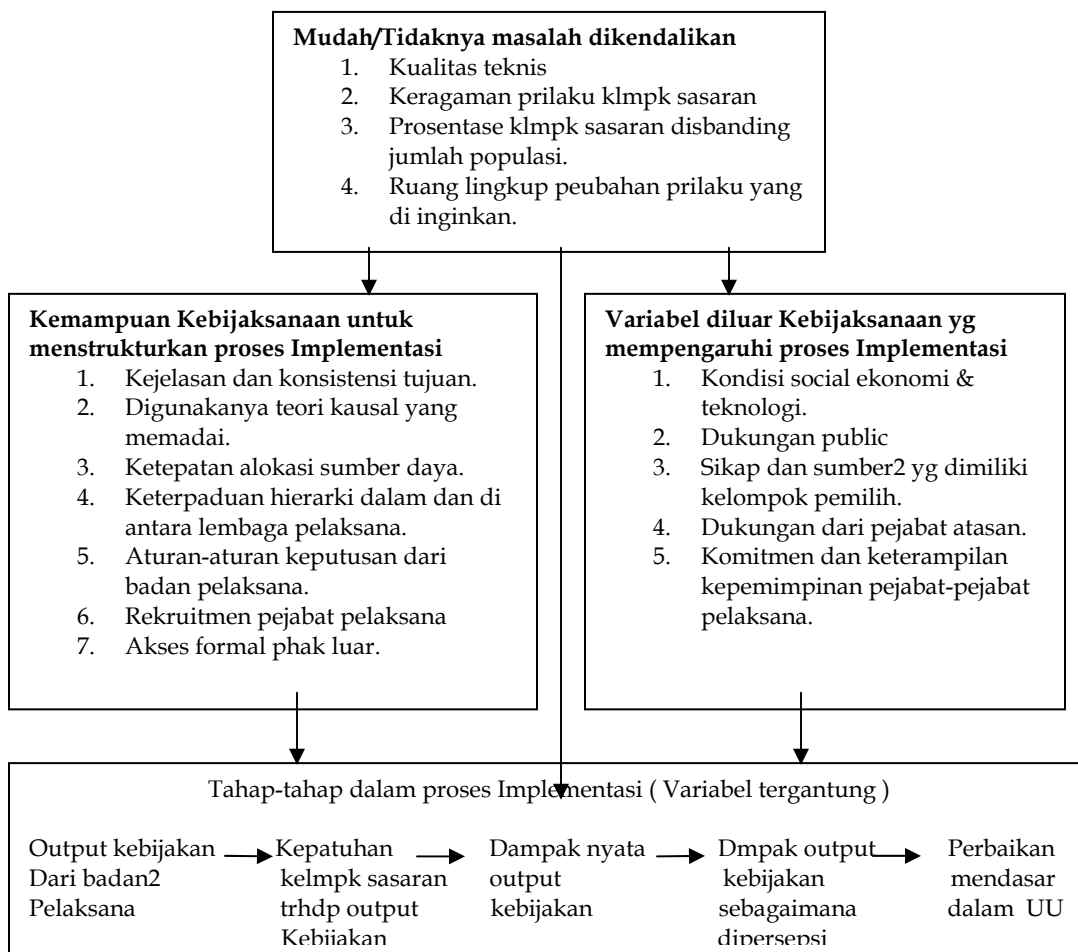


Sumber : Grindle, Merilles (Wibawa 1994.)

Menurut Paula A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (dalam Wahab, 1997:81) bahwa analisis implementasi kebijakan negara adalah melakukan identifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari seluruh proses implementasi. Variabel yang dimaksud telah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1. Kemudahan implementasi akan ditentukan oleh mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan.
2. Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses Implementasi.
3. Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses Implementasi.

Gambar . 3
Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmania, Daniel A dan
Sabatier, Paul A,



Sumber : Mazmanian, Daniel A dan Sabatier (Wahab, Solichin Abdul. 1997)

1. Karakteristik Masalah

- (1). Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program di implementasikan.
- (2). Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah di implementasikan apabila kelompok sasarnya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarnya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.
- (3). Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarnya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarnya tidak terlalu besar.
- (4). Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif

akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh implementasi UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sulit di implementasikan karena menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

2. Karakteristik Kebijakan

- (1) Kejelasan Isi Kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidak jelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. Kebijakan yang memiliki dasar teoretis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
- (3). Besarnya aloksi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta monitoring program, yang semuanya itu perlu biaya.
- (4). Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antara berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering sering

disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.

- (5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-negara Dunia ketiga, khususnya di Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.
- (7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayah.

3. Lingkungan Kebijakan

- (1). Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program

tersbut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

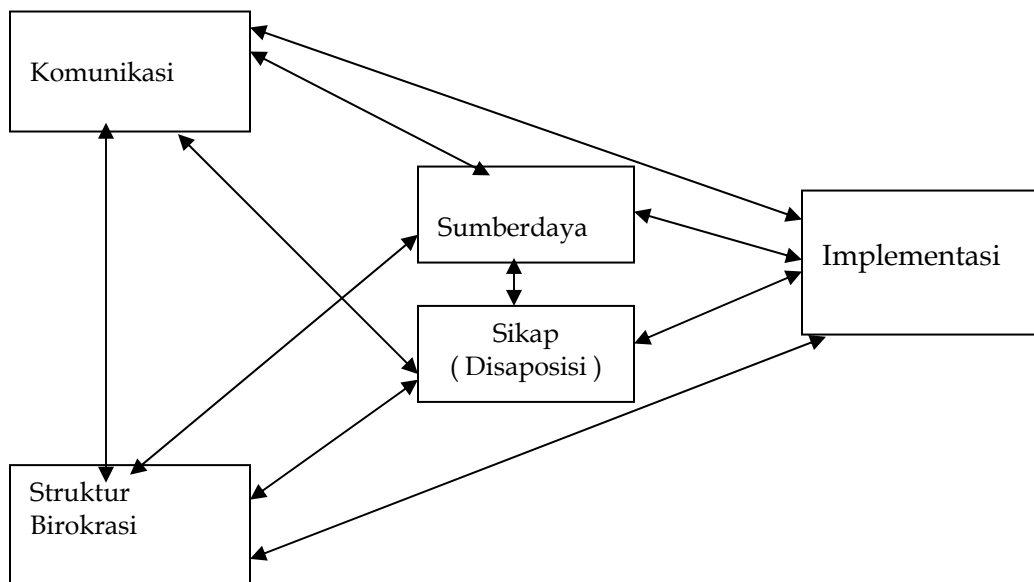
- (2). Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapat dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.
- (3). Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*) . Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain : (a) Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan; (b) Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislative.
- (4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Senada dengan pendapat-pendapat sebelumnya, menurut George C. Edward III (dalam Subarsono. AG, 2000 : 90) faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, antara lain :

1. Komunikasi; merupakan proses penyaluran informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Agar komunikasi menjadi efektif maka harus dipilih orang-orang yang tepat untuk menyampaikan dan menerima informasi agar informasi itu akurat.
2. Sumber-sumber daya (*resources*) ; dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik.
3. Sikap-sikap (*disposisi*) ; sikap dari pelaksana program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan.
4. Struktur; dua karakteristik birokrasi adalah SOPs (*Standart Operating Procedures*) dapat mempengaruhi implementasi, yaitu mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal yang bisa terjadi adalah pemborosan sumber daya, peningkatan tindakan-tindakan yang tidak di inginkan,

menghambat koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah.

Gambar . 4
Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III



Sumber : George C. Edward III (Subarsono. AG, 2000)

Dari berbagai teori yang telah disampaikan para ahli diatas maka peneliti memilih teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai landasan penelitian . Teori ini berasumsi bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sikap (*disposisi*), sumber daya, dan struktur birokrasi.

Dalam hal ini penulis hanya akan mengadopsi dua variabel bebas dari teori implementasi Edward yang relevan dengan kondisi permasalahan di lapangan, yaitu sikap dan sumber daya. Selanjutnya, dalam pemecahan indikator (*breakdown indicator*) tentang implementasi nantinya akan di adakan modifikasi teori dari George C. Edwar III dan pakar lainya dengan indikator implementasi dari Dinas Pendidikan selaku organisasi pelaksana program. Dengan demikian, hasil analisisnya diharapkan lebih memadai.

B. Hubungan Konsep Antar Fenomena

1. Hubungan antara pengetahuan masyarakat tentang nilai anak dengan program wajib belajar sembilan tahun.

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun bukan tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan orangtua. Tanggung jawab orangtua dalam menyukseskan program tersebut terlihat dari partisipasinya. Partisipasi tersebut juga dipengaruhi oleh pandangan orangtua tentang nilai anak. Sehubungan dengan nilai anak Simon (1977:35) memberikan ancangan bahwa nilai anak dapat dibagi menjadi (1) nilai positif, meliputi kepuasan kebaikan, dan keuntungan; (2) nilai negatif, meliputi gangguan (*disvalues*),

ongkos, beban, kesulitan, dan kerugian. Pandangan tersebut jelas memiliki hubungan terhadap kesuksesan program wajib belajar sembilan tahun. Orangtua hanya berorientasi pada nilai positif berarti keberadaan anak hanya dihitung dari segi keuntungan yang akan diperolehnya, namun orang tua tidak mau memikirkan tentang ongkos yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikannya. Jika orangtua memiliki pandangan yang demikian akan berdampak pada rendahnya partisipasinya dalam menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun.

2. Hubungan antara persepsi orangtua dengan program wajib belajar sembilan tahun.

Menurut Sudito (2000:16) bahwa persepsi merupakan suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus. Persepsi dipengaruhi oleh kerjasama dengan faktor luar (*stimulus*) dan faktor dalam (personal). Faktor luar meliputi hal-hal yang berasal dari luar individu, seperti pendidikan, pengalaman, lingkungan sosial, dan lain-lain. Faktor dalam adalah semua yang berasal dari dalam individu, seperti cipta, rasa, karsa dan keyakinan.

Persepsi orangtua terhadap pendidikan merupakan suatu konsep pikir orangtua mengenai makna dan arti penting proses pendidikan anak-anak mereka selepas pendidikan SD, kaitanya dengan relevansi pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Jika persepsi orangtua terhadap pendidikan baik, akan menopang munculnya aspirasi yang tinggi sehingga kesadaran untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan besar pula. Dengan demikian, persepsi orangtua tentang pendidikan merupakan suatu yang sangat penting dalam menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun.

3. Hubungan antara kondisi lingkungan / sosial ekonomi orangtua dengan program wajib belajar sembilan tahun

Mallassis (1981:105) berpendapat bahwa kondisi ekonomi meliputi kepemilikan kebendaan, pendapatan, penanaman modal, dan persediaan hidup, sedangkan status sosial meliputi keharmonisan rumah tangga, dan pendidikan orang tua. Kondisi sosial ekonomi tersebut akan mempengaruhi pola pikir dan sikap orangtua terhadap pendidikan anak. Orangtua yang memiliki ekonomi lemah pola pikir dan sikapnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan pendidikan anak bukan menjadi prioritas utama. Bagaimana mungkin mereka menyekolahkan anaknya sementara kesulitan hidup yang dihadapi selalu melilitnya. Demikian pula dengan kondisi sosial orangtua, status sosial dan pendidikan orang tua yang rendah akan memandang bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang penting. Pandangan yang terpenting baginya adalah bahwa hidup seseorang yang paling esensial adalah mampu mencari nafkah

untuk menghidupi keluarga. Di samping itu, pendidikan tidak menjanjikan pekerjaan dan kekayaan. Keharmonisan dalam rumah tangga juga mempengaruhi kondisi belajar anak. Anak akan merasa terganggu belajarnya jika keharmonisan keluarga berantakan. Jadi, kondisi sosial ekonomi merupakan sesuatu yang penting dan berpengaruh terhadap kesuksesan program wajib belajar sembilan tahun.

4. Hubungan antara pandangan orangtua tentang nilai anak, persepsi orangtua terhadap pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi dengan program wajib belajar sembilan tahun

Pandangan orangtua tentang nilai anak, persepsi orangtua terhadap pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi merupakan variabel prediktor. Artinya, ketiga variabel tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun. Ketiga variabel tersebut juga saling berhubungan dan menentukan variabel lain. Misalnya, pandangan orangtua tentang nilai anak akan berhubungan dengan persepsi pendidikan dan kondisi sosial ekonomi, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini akan mencari keterkaitan antara hubungan pandangan orangtua tentang nilai anak, persepsi orangtua tentang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi orangtua dengan partisipasi pada program wajib belajar sembilan tahun. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam tentang partisipasi masyarakat pada program wajib belajar sembilan tahun di distrik Semangga

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui realisasi kebijakan pemerintah, terutama tentang pentingnya program wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga. Dari penelaahan teori paling tidak ada dua domain dalam implementasi kebijakan, yakni : domain pelaksana kebijakan (pemerintah) dengan domain resipien (masyarakat sebagai target group). Karena analisis pelaksanaan program tersebut banyak factor yang mempengaruhi, maka penelitian ini difokuskan pada domain masyarakat penerima program, yakni tentang partisipasi dalam program wajar dan

bagaimana pandangan orangtua tentang nilai anak, persepsi orangtua tentang pendidikan, dan kondisi social ekonomi orangtua terhadap program wajib belajar sembilan tahun.

Fenomena di atas dipilih sebagai deteksi awal, dikarenakan sambutan orangtua dalam menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun belum optimal. Preposisi yang dibangun adalah “Kekurangoptimalan tersebut tidak lain karena masih terbelakangnya pandangan orangtua tentang nilai anak, dan persepsi pendidikan. Demikian pula dengan kondisi social ekonomi yang kurang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam program wajar 9 tahun”.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Distrik Semangga Kabupaten Merauke.

D. Definisi Operasional dan Penomena Yang di amati.

Adapun definisi operasional fenomena-fenomena tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi Program wajib belajar sembilan tahun adalah program yang dicanangkan pemerintah dengan mewajibkan kepada seluruh warga negara untuk menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, yaitu enam tahun di SD dan tiga

tahun di SLTP. Indikator dari partisipasi Program Wajib belajar sembilan tahun adalah sebagai berikut :

- Pemahaman tentang program wajib belajar sembilan tahun.
- Partisipasi dalam program wajar sembilan tahun.

b. Pandangan orangtua tentang nilai anak adalah harga/keberadaan anak menurut pandangan orangtuanya. Apakah keberadaan anak hanya dilihat dari nilai positif (kepuasan,kebaikan, dan keuntungan), nilai negatif (gangguan, ongkos, beban kesulitan, dan kerugian) atau kedua-duanya. Indikator dari Pandangan orangtua tentang nilai anak adalah sebagai berikut :

- Jumlah anak yang diharapkan orangtua.
- Harapan orangtua dari anak.
- Tingkat perhitungan kepentingan dari orangtua setelah menyekolahkan anaknya.

c. Persepsi orangtua tentang pendidikan adalah suatu pandangan orangtua dalam melihat konsep pendidikan. Artinya kemampuan orangtua dalam melihat visi dan manfaat pendidikan bagi anaknya. Indikator dari persepsi orangtua tentang pendidikan adalah :

- Derajat kepentingan pendidikan bagi anak.
- Derajat Persepsi Pendidikan untuk perbaikan masa depan.
- Persepsi orangtua pada pengangguran setelah lulus sekolah.

- Derajat Persepsi orangtua bahwa dengan bersekolah anak akan malas bekerja untuk membantu orangtuanya.
 - Derajat ketercukupan pendidikan dasar pada anak (Asal anak sudah bisa membaca dan menulis sudah cukup dan tak perlu melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi).
- d. Kondisi sosial ekonomi orang tua adalah kedudukan orangtua atau kelas orangtua dalam kehidupan bermasyarakat serta dilihat dari pendapatan dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Indikator dari Kondisi sosial ekonomi orangtua adalah sebagai berikut.
- Tingkat Pendapatan orangtua.
 - Tingkat ketercukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - Tingkat pendidikan orangtua.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah jawaban narasumber yang langsung didapat dari proses pengumpulan data, sedangkan data sekunder adalah data yang diolah peneliti dari data yang telah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain yang terkait dengan tema penelitian.

2. Sumber Data

Dalam peneitian kualitatif, menurut Nasution (1992:32) yang dapat dijadikan sampel sebagai sumber data hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi . Sampel dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang di observasi. Sumber data dari masing-masing jenis data yang akan dikumpulkan berasal dari informan, angket dan kepustakaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

Jenis data	sumber
Primer : Partsisipasi pada program wajar Nilai anak Kondisi sosial ekonomi Penyebab rendahnya partisipasi	Informan langsung (Kepala Dinas Dikdas, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Kepala Sekolah, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama)
Sekunder : Angka putus sekolah Penyebab putus sekolah	Instansi terkait

F. Instrumen Penelitian

Agar dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan instrumen atau alat penelitian sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Pemilihan metode kualitatif

dalam penelitian ini menggunakan penulis sendiri sebagai instrumen utama penelitian.

Instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis sendiri dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), sedangkan untuk memandu dalam wawancara, penulis menyiapkan panduan pertanyaan tentang hal-hal pokok yang ingin diketahui. Panduan ini untuk memudahkan penulis dalam mengarahkan pembicaraan atau wawancara. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara tersebut semakin berkembang sesuai kondisi di lapangan seperti bola salju (*snow ball*). Alat bantu yang digunakan dalam metode wawancara ini adalah tape recorder / camera dan catatan –catatan wawancara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara semi struktur dimana peneliti melakukan komunikasi dua arah dengan informan berdasarkan acuan daftar pertanyaan tipe terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) , dilanjutkan

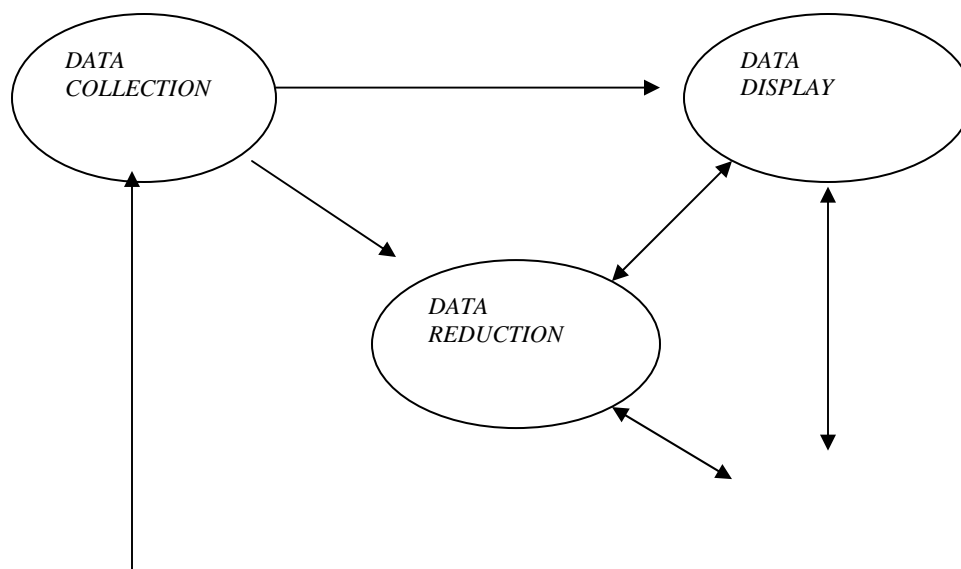
dengan wawancara lebih mendalam (*in depth interview*) .

Wawancara lebih mendalam digunakan karena pedoman wawancara yang digunakan belum sepenuhnya dapat merekam pandangan informan yang tidak sepenuhnya dapat di prediksi sebelumnya.

2. Observasi. Peneliti sebagai instrumen kunci melakukan pengamatan secara seksama terhadap fenomena terkait dengan partisipasi masyarakat dalam implementasi program wajib belajar sembilan tahun

H. Teknik Analisis Data.

Metode analisis yang dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam, FGD (Fokus Group Diskusi) dan observasi dilakukan analisa dengan metode analisis yang dikenalkan Miles dan Huberman (1992) sebagai *operational component* berikut.



Gb. III. 1. *Operational Component*, (Miles & Huberman, 1994)

Dengan pendekatan kualitatif, logika yang dibangun lebih ke arah induktif – abstraktif (Sanapiah Faisal, dalam Burhan Bungin, 2003; 68). Logika yang dibangun bertitik tolak dari "khusus" ke "umum", bukan umum ke khusus. Gambar yang dikemukakan Huberman dan Miles, menunjukkan interaksi antara *data collection* dengan analisis data. Pengumpulan data ditempatkan sebagai bagian integral dari analisis data. Hal ini karena dalam pengumpulan data, peneliti secara terus-menerus juga melakukan perbandingan-perbandingan, pengkayaan data untuk tujuan konseptualisasi, kategorisasi, atau mungkin juga teoritisasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

1. Hakekat Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 1994 program wajib belajar sembilan tahun merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia tujuh sampai dengan limabelas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar .

Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum. Artinya, pendidikan dasar merupakan pendidikan minimum yang berlaku untuk semua warganegara , tanpa kecuali. Sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 17 ayat (1) . Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Ayat (2)

Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah

menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan dasar berlangsung sembilan tahun, yaitu enam tahun di sekolah dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat. Hal ini tidak berarti bahwa SD dan SLTP menjadi bentuk satuan pendidikan yang bersatu atau dalam satu atap, tapi terpisah, meskipun keduanya merupakan pendidikan dasar.

Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Selain itu, pendidikan dasar diselenggarakan dengan memberikan pendidikan yang meliputi penumbuhan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan watak dan kepribadian, serta pemberian pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan dasar juga berusaha memberikan kesanggupan pada peserta didik bagi perkembangan kehidupannya, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dasar. Program pendidikan dasar dapat diberikan melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.

Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi dalam pendidikan dasar sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk (1) memperkuat dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (2) membiasakan diri siswa untuk berperilaku baik, (3) memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, (4) memelihara kesehatan jasmani dan rohani, (5) memberikan kehidupan untuk belajar, dan (6) membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri. Adapun pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat mencakup upaya untuk (1) memperkuat kesadaran hidup beragama dalam masyarakat, (2) menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam lingkungan hidup, (3) memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat (Kep. Mendikbud No. 0306 Th. 1995).

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, persamaan berarti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 , tidak dibedakan jenis menurut kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Jadi, secara yuridis etis, perbedaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (paling tidak pendidikan dasar).

Diantara jenjang pendidikan, pendidikan dasar merupakan jenjang yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam

upaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebab pada jenjang ini kemampuan dan keterampilan dasar dikembangkan pada peserta didik, baik sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan lanjutan pada pendidikan menengah maupun terjun ke masyarakat.

Wajib belajar pendidikan dasar berarti bahwa pemerintah membuka peluang seluas-seluasnya bagi semua peserta didik yang telah memenuhi persyaratan untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Wajib belajar di Indonesia mempunyai beberapa ciri, yaitu (1) tidak bersifat paksaan, melainkan persuasif, (2) tidak ada sangsi hukum dan yang paling menonjol adalah aspek moral, yakni peserta didik dan orang tua merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan dasar karena berbagai kemudahan yang telah disediakan, (3) tidak diatur dengan Undang-undang tersendiri, dan (4) keberhasilan di ukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar (Achmady, Zainal Arifin, 1994 : 11).

Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah merupakan suatu bentuk gerakan. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan yang ingin memperjuangkan kewajiban belajar. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban dalam hal ini merupakan arti didaktis, yaitu suatu kewajiban yang bersifat mendidik dan membimbing kearah kebaikan dan kemajuan. Oleh

karena itu, seluruh komponen bangsa akan merasa memiliki tanggung jawab moral dalam menyukseskan program ini.

Lahirnya sebuah kebijaksanaan publik dilatarbelakangi adanya suatu masalah. Masalah yang dimaksud adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Apa yang diharapkan suatu negara atau masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat tersebut. Demikian pula dengan lahirnya program wajib belajar sembilan tahun . Program ini dilatarbelakangi karna adanya suatu masalah yang ada di masyarakat. Yakni rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan banyaknya anak putus sekolah terutama di daerah pedesaan. Sementara itu, harapan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 adalah ” Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran ” . Oleh karena itu, banyaknya anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah karena letak geografis merupakan masalah yang besar, dengan demikian pemerintah membuat sebuah kebijaksanaan publik yang berupa penancangan sebuah program wajib belajar sembilan tahun yang ditujukan kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan.

Masalah proses implementasi kebijaksanaan tentang program wajib belajar sembilan tahun di pedesaan sudah menjadi masalah yang umum (*public problem*) karena masalah tersebut mempunyai akibat yang luas yaitu menyangkut pemerataan

pendidikan pada kususnya dan peningkatan sumber daya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah tetap akan mengatasi masalah tersebut sampai tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Hal ini terlihat dengan di undurnya batas berakhirnya program tersebut dari tahun 2004 menjadi tahun 2008. Charles O. Jones (1998) menekankan bahwa suatu masalah baru akan menjadi masalah-masalah kebijakan bila masalah-masalah tersebut dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan suatu tindakan terhadap masalah-masalah itu. Karena proses implementasi program wajib belajar sembilan tahun menjadi prioritas pemerintah untuk menuntaskanya maka masalah tersebut termasuk masalah kebijakan publik pemerintah Indonesia secara umum.

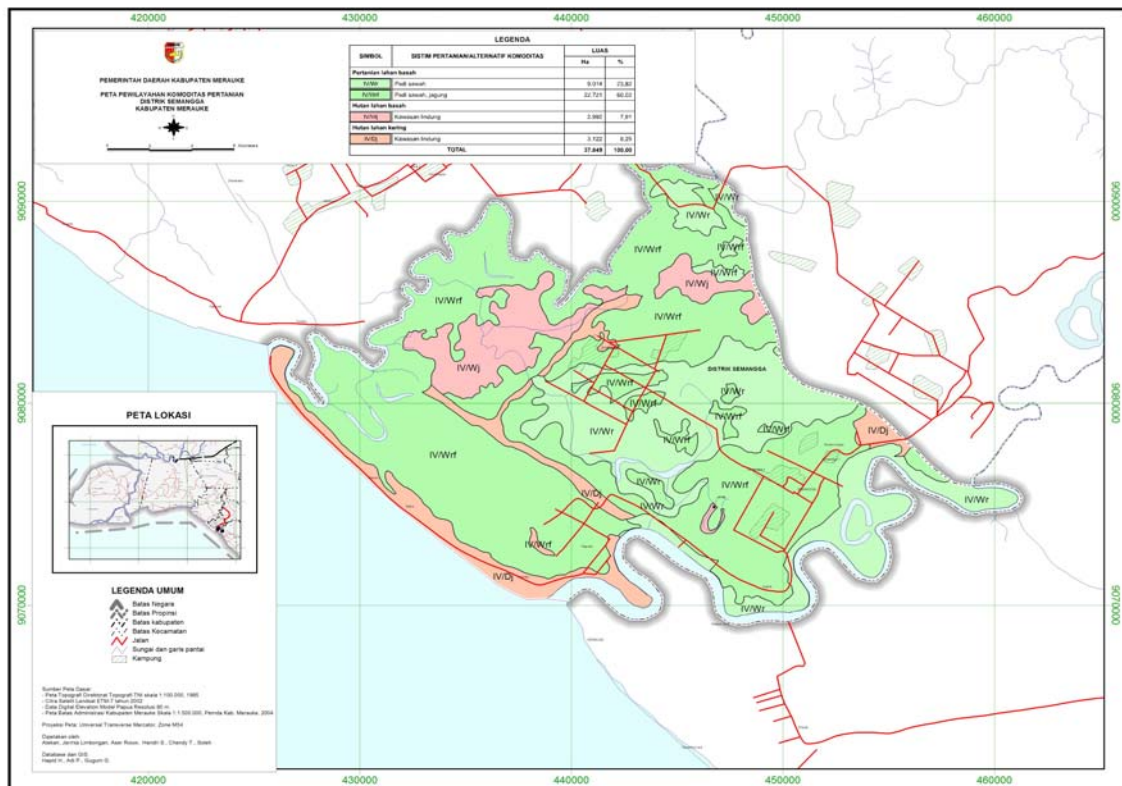
2. Letak dan Luas Wilayah

Distrik Semangga berada di pantai Selatan Kabupaten Merauke dengan luas wilayah 873 Km² dan terletak antara 140° 10' - 140° 40' Bujur Timur dan 8° 10' – 8° 40' Lintang Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafur Sebelah Barat berbatasan dengan Distri Kurik ; Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Tanah Miring ; Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Merauke

3. Administrasi

Distrik Semangga merupakan pemekaran dari Distrik Merauke, Distrik Semangga terdiri dari 10 Kampung dengan Ibukota Distrik di Muram Sari. Sepuluh Kampung tersebut adalah Kampung Matara, Waninggap Nanggo, Urumb, Sidomulyo, Kuprik, Kuper, Semangga Jaya, Marga Mulya, Muram Sari dan Waninggap Kai.



Gambar. 5 Peta Distrik Semangga

Jarak tempuh dari ibu Kota Kabupaten Merauke ke Distrik Semangga sejauh \pm 55 Km, dengan kondisi jalan beraspal, sepanjang kampung \pm 3 Km (jalan utama), sedangkan jalan memasuki lokasi Kampung – kampung kondisi jalan tanah (tidak beraspal).

4. Tofografi

Keadaan tanah/lokasi tanah datar dan tidak bergelombang, dengan jenis tanah Lumpur coklat (cocok untuk tanaman padi) dan Lembung berdebu (tidak cocok untuk ditanami padi).

5. Iklim

Iklim pada Distrik Semangga musim Kemarau berlangsung dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober dan Musim Hujan berlangsung dari bulan Nopember sampai dengan bulan Juni. Namun musim ini tidak menentu pada bulan-bulan tersebut dalam tahun berjalan (data terakhir Nopember 2003).

6. Pertanian

a. Padi

Pada tahun 2007 luas lahan sawah yang diolah sebanyak 4.200 Ha dengan produksi per Ha rata-rata sebanyak 12.040 Ton.

Disamping itu tidak menutup kemungkinan tidak mencapai target tersebut (12.040 ton) diakibatkan oleh kekurangan pupuk dan obat-obatan. Sebagai jalan keluar, masyarakat yang telah dibekali dengan penyuluhan oleh PPL, mengambil tindakan untuk cara penanggulangannya.

Hal lain untuk menunjang perolehan pupuk dan obat-obatan telah didirikan KUT (Kredit Usaha Tani), KKP (Kredit Ketahanan Pangan) dan Program Padat Karya.

Masa panen dilaksanakan 1 kali dalam setahun dengan sistem penjualan yaitu :

1. Petani

Petani menghasilkan hasil produksi pertanian berupa gabah kering.

2. Pengusaha

Pengusaha hasil produksi ini berupa usaha penggilingan padi (slep), yang merupakan bantuan dari pemerintah dan milik warga kampung. Hasil yang telah diperoleh petani dapat dijual pada Usaha Penggilingan ini dengan rata-rata harga sekitar Rp.

2.500,- hingga Rp. 3000,- per kilonya. (*data terakhir yang diterima dari PPL*)

3. Sub Dolog

Beras yang telah dibeli oleh usaha penggilingan padi kemudian disalurkan ke SUB DOLOG Distrik , sesuai harga standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

7. Tanaman Perkebunan

a. Jagung

Luas tanaman jagung seluas = 6 Ha, dengan hasil produksi penjualan Rp. 3.000,- per buah (panen muda).

b. Ubi Kayu

Luas tanaman ubi kayu seluas 32 Ha dengan hasil produksi di konsumsi dan dipasarkan sendiri sendiri.

c. Ubi Jalar

Luas tanaman ubi jalar seluas 20 Ha dengan hasil produksi di konsumsi dan dipasarkan sendiri sendiri.

d. Kacang Tanah

Luas tanaman Kacang Tanah seluas 5 Ha dengan hasil produksi sebesar 2,70 Ton dengan hasil produksi dikonsumsi dan dipasarkan sendiri sendiri.

e. Kacang Kedelai

Luas tanaman Kacang Kedelai seluas 32 Ha dengan hasil produksi 24,00 Ton dengan hasil produksi dikonsumsi dan dipasarkan sendiri.

f. Kacang Hijau

Luas tanaman Kacang Panjang seluas 27 Ha dengan hasil produksi 17,60 ton.

8. Peternakan

Tabel 3
Jumlah Ternak

No	Nama Ternak	Jumlah
1.	Sapi	3.694
2.	Kerbau	5
3.	Kambing	494
4.	Kuda	568
	Babi	145

Sumber Data : BPS/ Merauke dalam Angka 2007

Populasi ternak pada tahun 2007 di Distrik Semangga sebagai berikut : Sapi mencapai 3.694 ekor, kerbau 5 ekor, Kambing mencapai 494, kuda berjumlah 568 ekor dan babi berjumlah 145 ekor.

9. Karakteristik penduduk dan sosial

a. Penduduk

Mengenai Suku yang mendiami Distrik Semangga yaitu Suku Marind sebagai penduduk asli pada wilayah Distrik Semangga, pendatang dari Jawa yang sudah lama menetap sejak 1901 (suku Jemer) , suku Jawa (transmigrasi), suku Muyu, dan suku Mappi.

b. Perkembangan Penduduk Kampung menurut Jenis Kelamin.

Tabel 4
Komposisi Penduduk Tahun 2007

Tahun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
2007	2.920	5.860	5.273	11.133

Sumber Data : BPS/ Merauke dalam Angka 2007

Jumlah Penduduk Distrik Semangga adalah 11.133 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki mencapai 5.860

jiwa dan perempuan mencapai 5.273 jiwa. Jumlah kepala keluarga tercatat 2.920. Jumlah tersebut terdiri dari jumlah penduduk di kampung Muram Sari sebanyak 1.246 jiwa, kampung Matara 569 Jiwa, kampung Waninggap Nanggo 565 jiwa Kampung Urumb jumlah penduduk 723 jiwa, kampung Sidomulyo 663 jiwa, Kuprik 1.042 jiwa, kampung Kuper 435 jiwa, kampung Semangga jaya 2.435 jiwa, kampung Margamulya 1.324 jiwa dan kampung Waninggap Kai jumlah penduduk adalah 1.543 jiwa.

c. Keadaan Aparatur Pemerintahan

Distrik Semangga memiliki 10 kampung yaitu, kampung Muram Sari, Matara, Waninggap Nanggo, Urumb, Sidomulyo, Kuprik, Kuper, Semangga Jaya, Margamulya, dan Waninggap Kai.

Apabila dirinci menurut tingkat pendidikan, dari jumlah kepala kampung tersebut, yang berpendidikan SMA 3 orang, SMP 7 orang.

Tabel 5
Keadaan Pemerintahan Kampung

No	Jabatan	Nama	Ket
1.	Kepala Kampung Muram Sari	Suhendi	

2.	Kepala Kampung Waninggap Kai	Heri Haryanto	
3.	Kepala Kampung Margamulya	Eva Hardiyanto	
4.	Kepala Kampung Semangga Jaya	Sri Handayani	
5.	Kepala Kampung Kuper	Soter Basik-Basik	
6.	Kepala Kampung Kuprik	Abdulah J. Lauba	
7.	Kepala Kampung Sidomulyo	Iriyanto	
8.	Kepala kampung Urumb	Caspar M. Mahuze	
9.	Kepala Kampung Waninggap Nanggo	Yohan Tanoy	
10	Kepala Kampung Matara.	Alexander Erwawang	

Sumber Data : Monografi Distrik Semangga 2007

d. Pendidikan

Berdasarkan data pada BPS Kabupaten Merauke (Merauke dalam Angka) bidang pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 6
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar Negeri

Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid Terhadap		
				Sekolah	R. Belajar	Guru
7	44	54	1.447	207	33	27

--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data BPS/ Merauke Dalam Angka 2007

Berdasarkan pada tabel 6 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Sekolah Dasar Negeri yang berada di Distrik Semangga berjumlah 7 unit sekolah. Rasio terhadap sekolah mencapai 207, dan rasio murid terhadap ruang belajar mencapai 33 dan rasio murid terhadap guru tercatat 27 siswa untuk setiap guru.

Tabel 7
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar Swasta

Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid Terhadap		
				Sekolah	R. Belajar	Guru
4	24	30	491	123	20	16

Sumber : Data BPS/ Merauke Dalam Angka 2007

Berdasarkan pada tabel 7 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Sekolah Dasar swasta yang berada di Distrik Semangga berjumlah 4 unit sekolah. Rasio terhadap sekolah mencapai 123 , dan rasio murid terhadap ruang belajar mencapai 20 dan sedangkan rasio murid terhadap guru tercatat 16 siswa untuk setiap guru.

Tabel 8
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid SLTP Negeri

Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid Terhadap		
				Sekolah	R. Belajar	Guru
1	15	31	476	476	31	15

Sumber : Data BPS/ Merauke Dalam Angka 2007

Berdasarkan pada tabel 8 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Sekolah Lanjutan Pertama Negeri yang berada di Distrik Semangga berjumlah 1 unit sekolah. Rasio terhadap sekolah mencapai 476 , dan rasio murid terhadap ruang belajar mencapai 31 dan sedangkan rasio murid terhadap guru tercatat 15 siswa untuk setiap guru.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Partisipasi Masyarakat pada Program Wajib Belajar sembilan Tahun

Program wajib belajar sembilan tahun adalah program yang dicanangkan pemerintah dengan mewajibkan kepada seluruh warga negara untuk menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, yaitu enam tahun di SD dan tiga tahun di SLTP. Dalam rangka mendukung program pemerintaan tersebut diperlukana adanya dukungan dan partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaannya, oleh karena itu untuk mengetahui berjalan atau tidak program wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat terutama dukungan dari orang tua dalam menyekolahkan anaknya yang berumur 7 – 15 tahun.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada satu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan dasar dan menengah. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Merauke tahun 2007 adalah sebesar 80,25 %, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) nasional pada saat ini adalah 92,52 % dari target pencapaian tahun 2008 minimal 95 %.

Angka partisipasi sekolah dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia pendidikan yang sedang bersekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar sembilan tahun indikator inilah

yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar sembilan tahun dikatakan berhasil jika nilai APS SD > 95 % dan APS SMP > 70 %. Berdasarkan data Distrik Semangga tahun 2007 , Angka Partisipasi Sekolah untuk usia 7 – 12 tahun sebesar 83,32 % sementara untuk Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 sebesar 63, 12%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa APS SD / sederajat maupun APS SMP/ sederajat belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pemerintah tentang program wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Belum berhasilnya pencapaian target dari pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga dikarenakan berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Vincentius Mekiuw S.Sos)

“ Belum berhasilnya target pencapaian program wajib belajar sembilan tahun dikarenakan beberapa factor di antaranya kondisi geografis yang kurang mendukung, serta jarak sekolah yang cukup jauh yang harus di tempuh oleh murid, guru sebagai tenaga pengajarpun tidak betah tinggal di tempat tersebut,

sehingga proses pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik, pada tahun 2007 sebanyak 28 SD tidak di ikutkan ujian akhir karena tidak ada kegiatan belajar mengajar dikarenakan guru tidak ada ditempat. Disamping itu jarak yang agak susah di jangkau untuk menuju ke sekolah menjadi kendala, bayangkan di pedalaman anak-anak untuk pergi ke sekolah saja harus mendayung perahu melewati sungai dan rawa-rawa untuk sampai ke sekolah ini juga menjadi satu kendala dalam meningkatkan program wajib belajar sembilan tahun”.

Senada dengan Kepala Dinas Pendidikan Dasar, Kepala Distrik Semangga Husein Yasin mengatakan bahwa :

“Belum berhasilnya pencapaian target Program Wajib Belajar Sembilan tahun adalah diantaranya kurangnya pemahaman dan motivasi orang tua terhadap pentingnya pendidikan, sehingga banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan, bahkan kebanyakan mereka tidak sampai tamat SD , perhatian pemerintah terhadap pendidikan dasar sebenarnya sudah cukup besar , dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah, dimana untuk anak-anak SD dan SLTP tidak dipungut biaya, anak-anak tinggal sekolah saja , dari distrik juga ada bantuan bagi siswa yang berprestasi , bahkan dari pemerintah Daerah diberikan bantuan kendaraan sepeda bagi siswa yang jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh, Namun kembali ke keluarga lagi, dorongan terhadap anak sangat rendah, hal ini dikarenakan pendidikan orang tua sendiri sangat rendah”.

b. Analisis penyebab umum rendahnya APK (hasil dari berbagai sumber/ informan)

Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) khususnya di Distrik Semangga sebagai objek penelitian selain

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan anak, dan rendahnya pendidikan orangtua.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta diskusi dengan para informan, maka penulis dapat menyampaikan beberapa penyebab umum rendahnya angka partisipasi pada pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun sebagai berikut :

Menurut. Sony Betaubun, Kabid Pengembangan Pendidikan mengatakan bahwa :

“ rendahnya angka partisipasi salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya tenaga pengajar atau guru jarang di tempat kususnya di daerah yang jauh dari kota, sehingga murid lebih banyak berkeliaran dan bermain sendiri sehingga lama kelamaan akhirnya banyak yang keluar sekolah / berhenti sekolah, berbagai upaya sudah kita coba agar supaya para guru untuk tetap tinggal di tempat tugas untuk melaksanakan tugas, tapi sampai dengan saat ini belum ada perubahan yang berarti, bahkan pernah Kepala Dinas memberikan sanksi kepada sekolah yang tidak melaksanakan proses belajar mengajar untuk tidak mengikuti ujian karna kalau dilaksanakan sama halnya dengan mendukung pembodohan.”

Pelaksana Tugas Distrik Semangga (Muhamad Zaen Lauba) memberikan tanggapan tentang penyebab umum rendahnya angka partisipasi sebagai berikut :

“Rendahhnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya dikarenakan beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman dan manfaat pendidikan bagi anak, sehingga motivasi terhadap anak

untuk bersekolah sangat sangat minim, sehingga anak mau sekolah ataupun tidak orangtua tidak terlalu mempermasalahkan, yang berikut adalah faktor budaya ketika, acara adat (ritual) banyak anak – anak yang meninggalkan sekolah sampai berminggu-minggu, sehingga ketika kembali ke sekolah semangat belajar para murid menurun dan lama kelamaan merasa tidak betah tinggal di bangku sekolah”

Menurut Johanes Pelamonia (Kepala SLTP Negeri 3 Merauke) memberikan tanggapan sebagai berikut :

“ bahwa rendahnya angka partisipasi Kasar salah satu penyebabnya adalah kurangnya dorongan atau motivasi dari orang tua, seakan-akan orang tua menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada pihak sekolah, sehingga anak mau sekolah atau tidak orangtua tidak terlalu peduli, sehingga banyak anak berhenti sekolah di tengah jalan”.



Gambar : 6. Nilai budaya yang berlaku di masyarakat atau yang di anut seseorang anggota masyarakat akan berpengaruh terhadap pendidikan, terutama dalam memandang nilai anak.

Wawancara dengan Yoseph Gebze (Sekretaris Kampung Kuper) memberikan tanggapan sebagai berikut :

“ sebagian besar kitorang pu anak-anak pamalas sekolah di karenakan tidak adanya dorongan dari orangtua, orangtua ada keinginan untuk anak-anak sekolah, tapi hanya omong saja , anak-anak dorang tidak pernah di arahkan dan di kasih semangat supaya dorang mau pigi sekolah “



Gambar : 7. Salah satu Sekolah Dasar di Kampung Muram Sari Distrik Semangga.

” salah satu penyebabnya rendahnya partisipasi salah diantaranya yaitu rendahnya pendidikan orangtua , dan disamping itu juga pengaruh lingkungan alam, panggilan alam lebih kuat dibandingkan kemauan kitorang pu anak-anak untuk pigi sekolah”



Gambar : 8 Aktifitas masyarakat Kampung Matara sebelum pergi ke laut untuk menjaring ikan, konsentrasi serta perhatian mereka lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, pendidikan bagi anak-anak belum menjadi hal yang utama.

Wawancara dengan Alexander Erwawang Kepala
Kampung Matara sebagai berikut :

” Rendahnya partisipasi juga dipengaruhi oleh adanya kegiatan adat , pada saat acara gatsi, yamu pada saat itu anak-anak banyak yang ikut kegiatan tersebut, sehingga banyak meninggalkan sekolah hingga sampai satu bulan lebih, pada saat itu semua suku Marind yang ada (Gebze, Mahuze, Kaize, Basik-Basik, Ndiken, dan Balagaize) ikut dalam acara adat tersebut, sehingga kitorang pu anak-anak banyak yang tidak kembali ke sekolah setelah ikut acara tersebut”



Gambar : 9 Mudahnya mendapatkan uang bagi mereka terkadang mengakibatkan mereka memilih untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup.

Wawancara dengan Kamilus Mahuze Kepala Sekolah SD
YPPK St. Thomas.

” pada saat usia 7 tahun kitorang pu anak-anak banyak yang sekolah, nanti saat kelas 3 – 5 mulai pada

kaluar / putus sekolah, karena pengaruh dia pu kaka-kaka yang tidak pada sekolah pada umumnya mereka ikut dia pu kaka-kaka pigi di hutan, manjaring di laut juga pigi di rawa untuk cari ikan atau kepiting ”



Gambar. 10 Salah satu mata pencaharian masyarakat kampung urumb , seorang ibu sedang membuat kopra.Kondisi seperti ini seringkali melibatkan anak-anak sehingga kegiatan pendidikan seringkali terabaikan.

Dalam adat suku Marind dikenal dengan istilah suwanggi, suwanggi adalah ilmu gaib yang biasa digunakan untuk membunuh orang dari jarak jauh melalui suatu ritual (santet), ritual ini biasanya ditujukan untuk orang-orang marind yang sikap dan tingkah lakunya bertentangan dengan adat, namun dalam perkembangannya suwanggi digunakan untuk membunuh orang yang tidak disukai, biasanya sebelum suwanggi dikirim di mulai dengan acara ritual.

Wawancara dengan . Paskalis Basik-Basik guru SD Swasta di Urumb.

"hal yang sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan sekolah kitorang pu anak-anak adalah adanya suwanggi , pada dasarnya anak-anak mau untuk sekolah , tapi dengan adanya suwanggi anak-anak banyak yang tidak mau melanjutkan sekolah, karna mereka pu anggapan buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya mati di suwanggi, di wilayah distrik semangga kususnya putra daerah marind merka percaya bahwa kalau berpendidikan tinggi nanti akan bertolak belakang dengan kitorang pu adat istiadat, banyak contoh pejabat – pejabat putra Marind mereka sekolah tinggi dan akhirnya mati di suwanggi "



Gambar. 11 rendahnya pendidikan dan konsep berfikir orang tua sering mengakibatkan anak enggan untuk bersekolah.

Dari beberapa sumber yang disampaikan informan dapat disimpulkan bahwa rendahnya Angka Partisipasi pendidikan di distrik Semangga di karenakan rendahnya

pendidikan orangtua, kurangnya motivasi dari orangtua terhadap pendidikan anak, faktor lingkungan dan adat istiadat yang cukup berpengaruh. Sehingga untuk meningkatkan angka partisipasi terhadap pendidikan dasar sembilan tahun diperlukan dukungan berbagai pihak diantaranya pihak pemerintah, orangtua dan tokoh masyarakat (Kepala Suku / Pemangku ada)

2. Pandangan orangtua tentang nilai anak.

a. Nilai anak

Nilai anak adalah harga/keberadaan anak menurut pandangan orang tuanya. Apakah keberadaan anak hanya dilihat dari nilai positif (kepuasan,kebaikan, dan keuntungan), nilai negatif (ongkos, beban kesulitan, dan kerugian, termasuk biaya sekolah)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta diskusi dengan para informan, maka penulis dapat menyampaikan pandangan orangtua tentang nilai anak terhadap pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan Charles Gebze (Masyarakat Kampung Matara) , ia memberikan tanggapan tentang jumlah anak yang diharapkan, terutama keikutsertaan anak dalam membantu orangtua.

.... ” Kalau kitorang lebih suka anak banyak, karna kalau anak banyak kitorang pu anak-anak bisa bantu pekerjaan orang tua , jadi pakarjaan kitorang agak lebih ringat sadikit, seperti bapa sakarang , bapa pu anak 7 orang lain bisa ke laut cari ikan, ada yang kumpul kalapa, ada yang kehutan ikut dia pu kaka-kaka cari binatang buruan dan satu-satu kali kitorang pigi di hutan untuk pangkur sagu ”.



Gambar. 12 Sekelompok anak-anak ketika akan berburu rusa dan Saham (kanguru) , berburu merupakan suatu kegiatan yang menarik, sehingga tidak jarang mereka akan lebih memilih meninggalkan bangku sekolah.

Terkait dengan harapan orang tua terhadap anak – anak ,

Charles Gebze memberikan tanggapan sebagai berikut :

(Apa yang bapa dorang harapkan dari bapak dong pu anak-anak..?)

” harapan kitorang terhadap anak-anak, anak-anak yang sudah besar supaya bisa bantu kitorang untuk cari makan untuk kaluarga”.

- Baru dorang tara sakolah ka bapa..?

”Ya sakolah kalo dorang mau, tapi anak-anak dorang biasa lebih suka pigi di hutan untk cari binatang”.

Lebih lanjut Charles Gebze memberikan penjelasan tentang harapannya erhadap keberadaan anak-anak .

(kalo bapak dong pu anak sekolah kira-kira setelah anak selesai sakolah apa yang bapa dong harapkan..?)

” anak-anak harus bisa kerja bantu kitorang orang tua untuk cari wang , tapi sakarang cari keja dia pu susah saja, banyak yang sakolah tinggi tapi dorang juga balum dapa kerja, lebih baik kitorang pu anak bantu kerja orang tua saja ”.



Gambar. 13 Seorang anak mencari ikan membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Budaya yang diwariskan orang tua seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan program wajib belajar (pendidikan dasar).

Wawancara dengan Rafael Ndiken (

Warga masyarakat kampung Urumb) :

1. Menurut berapa banyak jumlah anak yang diharapkan.?

(menurut bapa berapa banyak anak yang bapak dorang suka)

” Kalau kitorang lebih suka anak banyak, karna kalau anak banyak mereka bisa bantu kitorang untuk bantu kerja ”.

2. Apa yang menjadi harapan orang tua dari anak..?

(Apa yang bapa dorang harapkan dari bapak dong pu anak-anak..?)

” harapan kitorang terhadap anak-anak, anak-anak yang sudah besar supaya bisa bantu kitorang untuk bantu cari makan kaluarga.

▪ Baru dorang tara sakolah ka bapa..?

”Dari anak – anak saja mau sekolah ka tidak , kalau kitorang paksa sakolah juga kalau anak tidak mau, kita tidak bisa paksa mereka”.

3. Bagaimana tingkat perhitungan kepentingan orang dari tua setelah menyekolahkan anaknya.?

(kalo bapak dong pu anak sakolah kira-kira setelah bapak dong pu anak selesai sakolah apa yang bapa dorang harapkan..?)

” sama saja kalo su selesai sekolah juga harus bantu orang tua, mau cari kerja sekarang susah , contoh anak tetangga dorang pigi cari kerja di kota, tapi kembali juga ke kampung, ”.



Gambar. 14 Rendahnya pendidikan orang tua seringkali keliru dalam menilai manfaat anak. Orang tua akan merasa puas apabila anak tersebut menjadi anak yang penurut dan rajin membantu orang tua.

Pada gambar di atas terlihat seorang anak sedang mengumpulkan pasir laut untuk di jual , hal tersebut dilakukan oleh anak tersebut dalam rangka membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Terbatasnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan menyebabkan ketidak perdulian orangtua terhadap kebutuhan pendidikan bagi anaknya. Selain itu kondisi sosial orangtua yang mengharuskan setiap anggota keluarga untuk berusaha membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga tidak jarang seorang anak terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah hanya untuk membantu orangtuanya.



Gambar. 15 Sekelompok anak-anak sedang mengolah sagu. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa orang tua hanya menilai anak dari segi keuntungannya tanpa memperhatikan kepentingan pendidikan bagi anak, sehingga akan berdampak terhadap partisipasi program wajib belajar 9 tahun.

Wawancara dengan Teodorus Balagaize (Masyarakat Kampung Waninggap Kai) :

1. Menurut berapa banyak jumlah anak yang diharapkan.?

(menurut bapa berapa banyak anak yang bapa dorang suka.)

” lebih baik anak banyak , supaya bisa bantu – bantu kitorang orang tua untuk bantu cari makan ”.

2. Apa yang menjadi harapan orangtua dari anak.?

(Apa yang bapa dorang harapkan dari bapak dong pu anak-anak..?)

” kalo anak – anak su besar- besar harus bisa bantu orang tua, karna siapa lagi yang bisa bantu kitorang untuk mencari makan (nafkah).

- Baru dorang tara sakolah ka bapa.?

"Dari anak – anak saja mau sekolah ka tidak , kalau kitorang paksa sakolah juga kalau anak tidak mau kita tidak bisa paksa mereka".

3. Bagaimana tingkat perhitungan kepentingan orang tua setelah menyekolahkan anaknya..?

(kalo bapak dong pu anak sakolah kira-kira setelah bapak dong pu anak selesai sakolah apa yang bapa dorang harapkan..?)

" anak-anak sekolah dengan tidak sekolah sama saja , nanti kalo su tamat sekolah juga akan bantu orang tua, tinggal anak mau pilih sakolah atau mau bantu orangtua. "



Gambar.16 Pandangan orang tua terhadap anak lebih berorientasi pada nilai positif anak (keuntungan yang akan diperoleh dari anak) tanpa memikirkan tentang ongkos/biaya yang di keluarkan untuk keperluan pendidikan anak.

Dari beberapa sumber yang disampaikan informan dapat disimpulkan bahwa orang tua lebih melihat anak dari segi keuntungan dan kepuasan orangtua (Nilai Positif) sementara mengabaikan kepentingan anak untuk

melaksanakan pendidikan / sekolah , hal tersebut dikarenakan kondisi pendidikan yang sangat minim sehingga orangtua lebih memilih anaknya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup daripada untuk sekolah, misalnya keluarga Ibu Teresia yang sempat penulis jumpai dan sempat berbincang- bincang, ia mengemukakan bahwa ibu Teresia memiliki 6 orang anak 5 laki-laki dan 1 perempuan, semuanya gagal untuk melanjutkan sekolah tidak sampai tamat SLTP, menurut ibu Teresia setelah anak-anak cukup besar mereka lebih memilih untuk ikut dengan kakak – kakanya atau orangtua untuk mencari makan (membantu mencari nafkah orangtua)



Gambar. 17 Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun bukan merupakan tanggung jawab pemerintah semata, tapi perlu dukungan serta pandangan orang tua dalam melihat manfaat anak dari segi pendidikan.

3. Persepsi Orang Tua Tentang Pendidikan.

a. Persepsi tentang pendidikan

Persepsi orangtua tentang pendidikan adalah suatu pandangan orangtua dalam melihat konsep pendidikan. Artinya kemampuan orangtua dalam melihat visi dan manfaat pendidikan bagi anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta diskusi dengan para informan, maka penulis dapat menyampaikan pandangan orang tua tentang pendidikan sebagai berikut :

Wawancara dengan Esebius Kaize (Masyarakat Kampung Kuper) ”

1. Menurut Bapak bagaimana tingkat kepentingan pendidikan untuk anak-anak Bapak.

(Menurut bapa dorang bagaimana pendidikan untuk Bapa dorang pu anak-anak)

”pendidikan sebenarnya penting juga, tapi kalo anak-anak dorang tidak mau sakolah kitorang susah untuk paksa mereka, nanti dorang pigi sekolah juga bolos juga, akhirnya kitorang su bosan sendiri ”.

2. Bagaimanakan pendapat orang tua tentang pendidikan untuk perbaikan masa depan anak.?

(bagaimana pendapat bapa dorang tentang pendidikan untuk perbaikan masa depan bapa dong pu anak-anak)

” pendidikan juga penting, tapi lingkungan alam lebih menarik perhatian kitorang pu anak-anak, karna orang tua-tua kita dari dulu hidup dan dibesarkan di lingkungan alam”.



Gambar. 18 Kegiatan berburu dan mencari ikan merupakan aktifitas rutin yang dilakukan, kegiatan tersebut seringkali membuat anak-anak lebih memilih untuk meninggalkan bangku sekolah.

Wawancara dengan Engelbertus Mahuze (masyarakat kampung Kuprik) ”

1. Menurut Bapak bagaimana tingkat kepentingan pendidikan bagi anak. ?

(Menurut bapa dorang pendidikan untuk kitorang pu anak-anak penting ka tidak)

” tidak terlalu penting, yang penting anak-anak dorang su bisa baca dan tulis , terserah anak-anak dorang saja mau sakolah terus ka tidak ”.
2. Bagaimanakan pendapat orangtua tentang pendidikan untuk perbaikan masa depan anak.?

(bagaimana pendapat bapa dorang tentang pendidikan untuk perbaikan masa depan bapa dong pu anak-anak.)

” pendidikan mungkin perlu , tapi kitorang pu anak-anak sabagian besar tidak mau sakolah dorang lebih suka pigi di hutan, laut untuk dorang cari makan, samua alam su sediakan tinggal kitorang ambil saja, ada ikan, rusa, kalapa di pantai banyak tinggal petik”.



Gambar. 19 Persepsi orang tua terhadap pendidikan akan berpengaruh terhadap konsep berfikir orang tua terhadap pentingnya proses pendidikan bagi anak.

b. Keterkaitan persepsi orangtua tentang pendidikan dengan partisipasi sekolah

Persepsi orangtua terhadap pendidikan merupakan suatu konsep pikir orangtua mengenai makna dan arti penting proses pendidikan anak-anak mereka selepas pendidikan SD, kaitanya dengan

relevansi pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Jika persepsi orangtua terhadap pendidikan baik, akan menopang munculnya aspirasi yang tinggi sehingga kesadaran untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan besar pula. Dengan demikian, persepsi orangtua tentang pendidikan merupakan suatu yang sangat penting dalam menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta diskusi dengan para informan, maka penulis dapat menyampaikan pandangan orangtua tentang keterkaitan persepsi orangtua tentang pendidikan dengan partisipasi sekolah sebagai berikut :

Engelbertus Kaize (masyarakat Kampung Muram)

” biar kitorang pu anak-anak sekolah tinggi juga tidak bisa menjamin kalau besar nanti bisa dapat pekerjaan, yang penting anak-anak bisa baca dan tulis sudah cukup, yang lebih penting adalah bagaimana kitorang pu anak-anak bisa membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidup sekolah itu dari anak-anak pu kemauan saja”.

Kasimirus Ndiken (Masyarakat Kampung Margamulya)

memberikan pendapat tentang pendidikan untuk anak perempuan .

” bagi anak perempuan sekolah tidak terlalu penting, karna kalau su besar nanti akan ikut dengan dia punya paitua, kalau su kawin nanti dia punya paitua urus, jadi untuk kitorang pu anak perempuan tidak perlu

terlalu lama sekolah, kalau terlalu lama nanti makan uang terlalu banyak”.

Bartolomeus Basik-Basik (Masyarakat kampung Sidomulyo) mengemukakan pendapatnya tentang pandangannya tentang pendidikan.

” untuk menjadi orang yang berhasil tidak perlu sekolah tinggi, yang penting umur sudah cukup dan bisa bekerja pasti jadi orang yang berhasil, seperti keluarga Pak. Simon dia pu anak-anak biar tidak sekolah dorang bisa beli motor jonson, dan belang (perahu penyebrangansungai) penting mau kerja keras pasti bisa berhasil”.



Gambar. 20 Belang (perahu penyebrangan sungai). Salah satu mata pencaharian masyarakat.

4. Kondisi Sosial Ekonomi Orangtua

- a. Gambaran kondisi Sosek orangtua

Kondisi sosial ekonomi orangtua adalah kedudukan orangtua atau kelas orangtua dalam kehidupan bermasyarakat serta dilihat dari pendapatan dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga di distrik semangga sebagian besar hidup dari bercocok tanam, nelayan tradisional, dan berburu. Sehingga penghasilan mereka tidak menentu kalau musim ikan atau udang di laut mereka akan mencari udang dan ikan, kalau musim kepiting mereka akan pergi ke rawa mencari kepiting dan pada musim kemarau mereka akan pergi ke hutan untuk berburu. Sebagian besar kehidupan mereka hanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan untuk makan dan minum, sementara untuk kelayakan tempat tinggal tidak terlalu mereka perhatikan.



Gambar.21 Kondisi kehidupan Warga Masyarakat Kampung Waninang Nango.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta diskusi dengan para informan, maka penulis dapat menyampaikan pandangan masyarakat tentang kondisi sosial ekonomi orang tua sebagai berikut :

Charles Gebze , memberikan tanggapan tentang keadaan ekonomi keluarga / pendapatan keluarga

” kalo pendapatan tidak pasti, tergantung musim , yang penting kitorang bisa makan dan ada persediaan untuk besok ”.

Lebih lanjut terkait dengan ketercukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup Charles Gebze mengatakan bahwa :

” kalo untuk makan dan kebutuhan sehari – hari su cukup, untuk makan kitorang bisa ambil ikan di laut, kelapa di kitorang pu kebun, jadi untuk kitorang makan su cukup”.



Gambar. 22 Kondisi sosial ekonomi orang tua yang rendah menyebabkan ketidak mampuan orang tua dalam memberikan pemahaman tentang pendidikan serta fasilitas belajar yang memadai pada anaknya.

Teodorus Balagaize memberikan tanggapan tentang pendapatan keluarganya :

” kitorang pu pendapatan tidak pasti, tergantung musim saja ,kalau musim ikan dan udang di laut cukup lumayan, yang penting kitorang mau untuk pigi manjaring di laut ”. Lebih lanjut Bapak Teodorus mengatakan *” kalo untuk makan dan kebutuhan sehari – hari su cukup, kitorang tidak susah kalo hanya untuk makan saja”.*

b. Keterkaitan kondisi sosek dengan partisipasi sekolah

Kondisi sosial ekonomi meliputi kemilikan kebendaan, pendapatan, penanaman modal, dan persediaan hidup, sedangkan status sosial meliputi keharmonisan rumah tangga, dan pendidikan orangtua. Kondisi sosial ekonomi tersebut akan mempengaruhi pola pikir dan sikap orangtua terhadap pendidikan anak. Orangtua yang memiliki ekonomi lemah pola pikir dan sikapnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan pendidikan anak bukan menjadi prioritas utama. Bagaimana mungkin mereka menyekolahkan anaknya sementara kesulitan hidup yang dihadapi selalu melilitnya. Demikian pula dengan kondisi sosial orangtua, status sosial dan pendidikan orangtua yang rendah akan memandang bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang penting. Pandangan yang terpenting baginya adalah bahwa hidup seseorang yang paling esensial adalah mampu mencari

nafkah untuk menghidupi keluarga. Di samping itu, pendidikan tidak menjanjikan pekerjaan dan kekayaan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta diskusi dengan para informan, maka penulis dapat menyampaikan keterkaitan kondisi sosial ekonomi orangtua dengan partisipasi sekolah berikut :

Magdalena Basik-Basik (Tokoh Agama) mengatakan tentang kondisi sosial ekonomi dan partisipasi sekolah :

” Pada umumnya perekonomian masyarakat kampung kita ini boleh di bilang masih rendah, bagi mereka ada yang untuk di makan hari ini dan besok mereka anggap sudah cukup, besok dan seterusnya tidak terlalu mereka pikirkan, karena mereka beranggapan masih bisa cari lagi dari hasil alam, satu kaelemahaman mereka adalah bahwa mereka tidak pernah memikirkan untuk kebutuhan / keperluan untuk sekolah anak-anak mereka”.



Gambar. 23 Kondisi rumah warga yang sangat sederhana, tanpa penerangan listrik.

Bernardus Samkakai (Tokoh Masyarakat) mengatakan bahwa:

” Mereka kurang memperhatikan anak-anak , karena mereka tiap hari sibuk ke hutan, kebun, laut bahkan mereka sering mengajak anak-anak untuk tinggal berminggu-minggu di hutan (ubun) untuk mencari ikan, binatang buruan, yang berikut adalah orang tua tidak pernah memperhatikan keperluan anak-anak seperti buku-buku, pakaian sekolah, hal ini mebuat anak-anak tidak pernah belajar, ditambah lagi dengan kondisi penerangan yang sangat kurang memenuhi syarat, dimana kondisi kampung yang belum terjangkau oleh penerangan listrik, hal ini menambah buruknya kondisi belajar siswa, kondisi inilah yang membuat anak jadi malas belajar, dan akhirnya malas sekolah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi orangtua sangat berpengaruh terhadap partisipasi orangtua dalam menyekolahkan anaknya, walaupun dari pihak pemerintah telah memberikan bantuan dengan membebaskan biaya pendidikan untuk anak-anak usia SD dan SLTP, namun sebagian masyarakat tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut, karena anak-anak mereka tetap akan membantu orangtua dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, hal ini disebabkan karena rendahnya pandangan orangtua tentang manfaat pendidikan bagi anak.

C. DISKUSI

C.1. Partisipasi pada Program Wajib Belajar sembilan Tahun

Dalam menerima kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat dituntut dapat memahami, menghayati, dan melaksanakannya sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, keterlibatan atau partisipasi masyarakat amatlah dibutuhkan demi terciptanya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang program wajib belajar sembilan tahun, merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia tujuh sampai dengan limabelas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar . Untuk itu perlu diciptakan suatu kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan serta terwujudnya kreatifitas dan aktifitas di kalangan masyarakat”. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah akan terlihat dari perilaku mendukung dan melaksanakan kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan.

Kajian utama dalam penelitian ini adalah implementasi program Wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga. Banyak definisi tentang implementasi yang telah disajikan dalam bab tinjauan pustaka, dan untuk pembahasan lebih lanjut , menggunakan definisi dari Meter dan Horn, yakni : Implementasi yang di artikan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah

maupun swasta baik secara individu maupun kelompok, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam suatu kebijakan. Mengingat bahwa program wajib belajar sembilan tahun dalam implementasinya, menempatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menangani permasalahan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung program wajar sembilan tahun dimaksud.

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn dalam pembahasan ini akan mengutip salah satu poin yang di kemukakan oleh Van Meter dan Horn yaitu tentang kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Masyarakat di Distrik semangga memiliki satu pola hidup yang masih berpegang teguh pada adat istiadat, pola hidup masyarakat yang masih mengandalkan sumber perekonomian masyarakat pada alam serta pola pikir masih terbatas untuk dapat merespon program-program dari pemerintah, kondisi perekonomian masyarakat yang rendah akan berpengaruh terhadap dukungan masyarakat

terhadap pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di distrik semangga, karena orang tua tidak mampu untuk menyediakan sarana belajar bagi anak.

Pembahasan menurut model George C. Edwar III . Teori ini berasumsi bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sikap (*disposisi*), sumber daya, dan struktur birokrasi. Sikap dari pelaksana program akan sangat mempengaruhi didalam tahap implementasi. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan, begitupun sebaliknya. Sikap dari pelaksana program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan, selain itu pula sikap pelaksana program di lapangan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program, kondisi masyarakat di Distrik semangga memiliki suatu budaya yang apabila mereka dikhanati mereka akan susah untuk memaafkan ” orang marind kalau sudah bilang ”**matohale**” jangan harap mereka mau mendengar apa yang disampaikan walaupun itu suatu program dari pemerintah.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle salah satunya dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) Variabel isi

kebijakan ini mencakup : (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target groups* ; (3) sejauh mana perubahan yang di inginkan dari sebuah kebijakan . Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan prilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit di implementasikan daripada sekedar program yang memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin. ; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci ; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam implementasi kebijakan masyarakat harus tahu tujuan dan manfaat daripada program yang di implementasikan, demikian pula dengan masyarakat di Distrik Semangga dalam proses implementasi program wajib belajar sembilan tahun belum mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat hal ini disebabkan masyarakat sebagai terget group belum memahami dan manfaat daripada dilaksanakanya program kebijakan tersebut.

Menurut Paula A. Sabatier dan Daniel Mazmanian bahwa analisis implementasi kebijakan negara adalah melakukan identifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari seluruh proses implementas. Sebuah program yang bertujuan

memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Masyarakat Distrik Semangga yang sebagian besar adalah penduduk asli (Marind) pola hidup serta karakteristik kehidupan mereka terikat dalam suatu pola budaya yang sudah terwarisi secara turun temurun, hal ini sering mengakibatkan benturan antara nilai-nilai budaya (adat istiadat) mereka dengan pelaksanaan program-program pemerintah.

Fenomena yang sering muncul yakni karena kondisi geografis dan budaya masyarakat terkadang menjadi alasan bagi para petugas menjalankan tugas dalam memberikan sosialisasi tentang program wajib belajar sembilan tahun, sebagai pelaksana seharusnya lebih mengedepankan proses pencapaian tujuan daripada suatu kebijakan, sebagai contoh, dalam pelaksanaan sosialisasi program wajib belajar sembilan tahun di kabupaten Merauke dimana pesertanya terdiri dari unsur pemerintah (kepala Distrik, Kepala Kampung, dan Kepala Sekolah) , Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama, para peserta di undang ke Kabupaten yang jaraknya cukup jauh dan memakan waktu dan biaya, sehingga proses pelaksanaan sosialisasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena banyak peserta yang tidak hadir dalam acara sosialisasi tersebut.

Dari fenomena tersebut, dapat diambil suatu pelajaran tentang bagaimana menyiapkan sebuah organisasi pelaksana agar lebih efektif dan efisien. Apabila proses tahap pelaksanaan program terbentur oleh kualitas SDM di Masyarakat, maka disinilah peran serta kemampuan para petugas pelaksana diuji kemampuannya dalam melaksanakan program pemerintah.

C.2. Pandangan Orangtua Tentang Nilai Anak.

Nilai budaya yang berlaku dimasyarakat atau yang dianut seorang anggota masyarakat akan berpengaruh terhadap pendidikan , terutama dalam memandang nilai anak. Nilai yang dimaksud disini adalah hal-hal yang di anggap baik dan di yakini. Nilai juga dipandang sebagai kaidah hidup seseorang sehingga sesuatu yang di anggap baik akan selalu dihargai, dipelihara, dan di agungkan dalam mengambil suatu keputusan.

Pandangan orangtua tentang nilai anak merupakan pandangan orang tua dalam melihat nilai anak, baik dari segi positif maupun negatifnya. Segi positif terlihat dalam kepuasan, kebaikan dan keuntungan sedangkan segi negatifnya dilihat dari ongkos, beban kesulitan, dan kerugian. Dengan demikian pandangan orangtua tentang nilai anak dapat dilihat dari visinya dalam melihat manfaat anak. Dalam kehidupan di pedesaan / kampung, sebagian nilai positif anak akan memegang

peranan penting dalam membantu memutar roda ekonomi rumah tangga keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta diskusi dengan para informan, pada umumnya orangtua merasa puas jika anak mereka dapat membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, anak dipandang memiliki memiliki nilai yang tinggi dan akan memberikan kepuasan yang tinggi apabila dapat membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya akan, anak akan memiliki nilai yang rendah atau tidak menimbulkan kepuasan orang tua apabila tidak dapat membantu orang tua dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Jadi, semakin besar kontribusi anak dalam membantu orang tua semakin besar pula rasa kepuasan orangtua.

Rendahnya pandangan orangtua tentang nilai anak disebabkan karna kurang / atau rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, terutama pendidikan orangtua, kalau kita lihat di lokasi penelitian terkait dengan upaya pemberian informasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak sangat kurang, hal ini perlu adanya perencanaan dan koordinasi antara instansi terkait dalam pengembangan sumber daya masyarakat, sehingga wawasan dan pengetahuan masyarakat akan bertambah baik dalam melihat kehidupan di masa depan.

C3. Persepsi orang tua Tentang Pendidikan

Persepsi orang tua tentang pendidikan yaitu anggapan orang tua dalam memandang fungsi pendidikan bagi anaknya. Oleh karena itu, pandangan tersebut dapat diamati dari cara orangtua dalam menilai arti penting belajar bagi anak-anaknya dan dapat pula dilihat dari cara memahami nilai fungsional pendidikan bagi masa depan anaknya.

Persepsi orangtua tentang pendidikan anak merupakan suatu konsep pikir orangtua mengenai makna dan arti penting proses pendidikan, kesadaran akan pentingnya pendidikan akan menentukan tinggi rendahnya tingkat partisipasi orangtua dalam menyekolahkan anaknya. Disamping itu keputusan orangtua untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikan anak akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya siswa yang putus sekolah.

Persoalan lain yang menjadi penyebab adanya putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang SLTP adalah masalah klasik, yaitu persepsi orangtua di perkampungan yang menganggap bahwa pendidikan untuk anak wanita kurang penting, hal ini didasari adanya anggapan bahwa yang bertanggung jawab kelak setelah berumah tangga adalah pihak laki-laki sehingga pihak perempuan hanya membantu.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta diskusi dengan para informan, di Distrik Semangga bahwa pada umumnya orangtua dalam memandang pentingnya pendidikan

bagi anaknya masih sangat rendah , sehingga mereka tidak memperdulikan anak-anak mereka mau sekolah atau tidak. Fenomena lain yang berkembang di masyarakat bahwa rendahnya partisipasi sekolah disebabkan oleh pengaruh lingkungan, dimana anak-anak lebih suka pergi ikut orangtua ke hutan atau ke kebun untuk membantu orangtuanya bekerja, di samping itu pula bahwa lingkungan alam lebih menarik perhatian mereka daripada untuk pergi ke sekolah. Hal lain yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi pendidikan adalah kegiatan pesta adat (gatsi, yamui) , dimana dalam kegiatan ini di ikuti oleh seluruh marga marind yang ada di merauke, dan otomatis anak-anak mereka ikut dalam acara dimaksud, padahal acara tersebut memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai 1 bulan, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap aktifitas belajar anak-anak dan biasanya karna lama meninggalkan bangku sekolah sebagian besar mereka tidak mau kembali ke bangku sekolah.

Kondisi seperti ini kalau dibiarkan akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan generasi mendatang, oleh karna itu perlu ada suatu upaya dari pemerintah terhadap perbaikan sistem pendidikan dan budaya , pemerintah dan semua unsur masyarakat tokoh masyarakat (kepala dusun, kepala suku), Lembaga Masyarakat Adat (LMA) , duduk bersama untuk membicarakan tentang kepentingan pendidikan bagi anak-anak.

Dalam mengimplementasi kebijakan hendaknya pemerintah menjalin suatu komunikasi, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat, LMA dan tokoh-tokoh agama karena mereka mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

C.4. Kondisi Sosial Ekonomi Orangtua

Kondisi sosial ekonomi orangtua adalah kedudukan orang tua atau kelas orangtua dalam kehidupan bermasyarakat serta dilihat dari pendapatan dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kondisi sosial ekonomi meliputi kemampuan sosial ekonomi orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya.

Status sosial keluarga (orangtua) yang rendah menyebabkan ketidak mampuan orangtua dalam memberikan fasilitas belajar yang memadai pada anak-anaknya. Pendidikan rendah yang disandang orangtua menyebabkan tidak mempunya orang tua memberikan wawasan tentang pendidikan bagi anaknya, sehingga anak cenderung akan mengikuti pola – pola yang dilakukan orangtuanya, sehingga banyak anak-anak yang tidak sekolah / putus sekolah karena orangtua tidak perdului dengan perkembangan pendidikan bagi anak.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta diskusi dengan para informan, kondisi ekonomi orangtua rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para informan,

walaupun untuk makan sehari hari bisa di cari di hutan dan laut namun semua hanya pas-pasan karna pola hidup mereka berbeda dengan orang-orang yang maju, merka mencari nafkah hanya untuk dimakan hari ini, untuk besok hari mereka tidak terlalu memikirkan, karena mereka beranggapan masih banyak persediaan di hutan maupun di laut, pola pikir mereka tentang pendidikan bagi anaknya sangat rendah, mereka tidak pernah memikirkan fasilitas pendidikan untuk anak-anaknya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, maka penelitian tentang rendahnya partisipasi masyarakat pada implementasi program wajib belajar sembilan tahun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan wawancara dengan para informan terkait dengan pandangan orang tua tentang nilai anak dalam program wajib belajar sembilan tahun masih sangat rendah, hal ini terlihat dari tanggapan orangtua, rata-rata mereka lebih senang apabila anak-anak mereka bisa membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pandangan orangtua tentang nilai anak yang lebih cenderung melihat anak dari segi keuntungan akan sangat berpengaruh dalam kaitanya terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Distrik Semangga.
2. Berdasarkan wawancara dengan para informan terkait dengan persepsi orangtua tentang pendidikan dalam program wajib

belajar sembilan tahun masih Sangat rendah, hal ini terlihat dari tanggapan orang tua, rata-rata mereka tidak peduli anaknya mau sekolah atau tidak dan tidak ada motivasi serta dukungan dari orangtua agar anak mereka sekolah.

3. Pandangan orangtua tentang pendidikan di Distrik Semangga sebagian besar memandang pendidikan tidak begitu penting hal ini terbukti bahwa tidak adanya dorongan serta dukungan terhadap program wajib belajar sembilan tahun.
4. Rendahnya kondisi sosial ekonomi orangtua mengakibatkan rendahnya pula kemampuan serta dukungan orangtua terhadap program wajib belajar sembilan tahun.

B. SARAN

Sebagai upaya memberi masukan kepada pengambilan kebijakan , maka dari hasil kajian penelitian tentang implementasi program wajib belajar sembilan tahun, penulis memberikan konsep implementasi program wajib belajar sembilan tahun sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di distrik Semangga belum sesuai dengan harapan, oleh karena itu perlu adanya dukungan dan kerjasama dalam wujud sosialisasi dari segenap elemen pemerintah (Dinas Pendidikan, Kepala Distrik, Kepala

Kampung) dan Masyarakat (Tokoh agama, LSM, Kepala Dusun ,LMA, dll) untuk bersama-sama mendukung proses implementasi program wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga.

2. Perlu adanya upaya pemerintah dengan melakukan pendekatan budaya (melalui tokoh adat) terkait dengan pandangan orangtua tentang nilai anak dan bagaimana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nilai anak jangan dilihat dari segi manfaatnya saja, tapi anak juga mempunyai kewajiban untuk mengenyam pendidikan demi masa depan mereka.
3. Mengenai pandangan orangtua tentang pendidikan, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi tentang betapa pentingnya pendidikan dasar bagi anak.
4. Kondisi sosial ekonomi orangtua masih rendah, sehingga perlu adanya program perbaikan ekonomi dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut, misalnya dengan memberikan bantuan berupa jaring dan perahu bagi masyarakat.

